

SKRIPSI

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PENDAPATAN ATAS PENJUALAN LISTRIK PASCABAYAR PADA PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR BERDASARKAN PSAK No.23



**NERSIANA POLE
1410321145**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PENDAPATAN ATAS PENJUALAN LISTRIK PASCABAYAR PADA PT PLN (PERSERO) SULSELABAR BERDASARKAN PSAK No.23



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi

**NERSIANA POLE
1410321145**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PENDAPATAN ATAS PENJUALAN LISTRIK PASCABAYAR PADA PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR BERDASARKAN PSAK NO.23

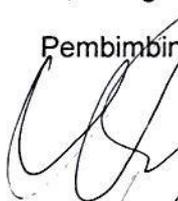
disusun dan diajukan oleh

Nersiana Pole
1410321145

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 25 Agustus 2018

Pembimbing



Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Muhammad Gafur, S.E., M.Si

SKRIPSI

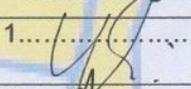
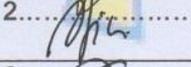
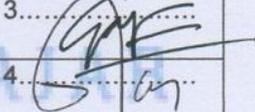
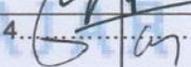
ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PENDAPATAN ATAS PENJUALAN LISTRIK PASCABAYAR PADA PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELBAR BERDASARKAN PSAK NO.23

disusun dan diajukan oleh

NERSIANA POLE
1410321145

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **25 Agustus 2018** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Penguji	1..... 
2.	Rastina, S.E., MSi., Ak., CA	Sekretaris Penguji	2..... 
3.	Muhammad Gafur, S.E., M.Si	Anggota Penguji	3..... 
4.	Dr. Abdul Samad A, S.E., M.Si	Penguji Eksternal	4..... 

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu – Ilmu Sosial
Universitas Fajar


Muhammad Gafur, S.E., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nersiana Pole
NIM : 1410321145
Program Studi : Akuntansi S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Pendapatan Atas Penjualan Listrik Pascabayar Pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar Berdasarkan PSAK No.23**, adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, September 2018

Yang membuat pernyataan,



NERSIANA POLE

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat, Rahmat dan Pertolongan-Nya yang telah memberikan kesehatan, dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul analisis perlakuan akuntansi terhadap pendapatan atas penjualan listrik pascabayar pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar. Sebagai syarat kelulusan studi di program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu – Ilmu Sosial Universitas Fajar.

Berkat dan dukungan dari semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih kepada Kedua orang tua yang saya banggakan yaitu Bapak Yohanis Sumule dan Ibu Esther Minggu, yang telah memberikan doa, dorongan, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan penulis dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Yasmi, S.E., M.Si.,Ak.,CA selaku pembimbing yang telah mengarahkan, memberikan nasehat, masukan serta waktunya selama penulisan skripsi sehingga penulisan ini berjalan dengan lancar. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini. Oleh Karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs.H. Sadly Abdul Djabar MPA selaku rektor Universitas Fajar.
2. Bapak Dr. Ir. Mujahid, S.E., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.
3. Bapak Muhammad Gafur, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Fajar.
4. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Fajar

5. Staf Kantor PT PLN (Persero) Sulselrabar atas pemberian izin kepada penulis untuk melakukan kegiatan penelitian, terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh semua pihak yang selama melakukan kegiatan penelitian.
6. Larusmadi yang telah membantu memberikan masukan dan saran dalam penyusunan skripsi.
7. Saudara penulis yang tercinta kepada kakak Yulfriliani Neli, Sry yanti, Yunita, dan adik Apriliani Ayon yang selalu memberikan dukungan baik materi maupun non materi.
8. Rinto Toding yang selalu memberi semangat, doa dan hiburan.
9. Elsiana Salong yang selalu menemani penulis dalam menyusun penulisan skripsi.
10. Teman seperjuangan yang selalu membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi hingga selesai (Siti Dewi Sartika, Hilda Novianti, Andi Julianti, Maria Angelina, Sriwanti Patandean, Karisma Datu, Sri Hidayatil).
11. Dan semua pihak yang tidak sempat disebutkan penulis satu per satu yang telah berpartisipasi membantu selama penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam laporan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca dan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. God Bless. Amen.

Makassar, September 2018

Peneliti

ABSTRAK

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PENDAPATAN ATAS PENJUALAN LISTRIK PASCABAYAR PADA PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR BERDASARKAN PSAK No.23

**Nersiana Pole
Yasmi**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi terhadap pendapatan pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar telah sesuai dengan PSAK No. 23. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dimana data yang telah dikumpulkan, kemudian disusun dan diaalisis yang memberikan gambaran yang terkait dengan pendapatan penjualan listrik pascabayar dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah didapat. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perlakuan akuntansi pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK No. 23. Dimana pengakuan pendapatan menggunakan metode *accrual basis*. Pengukuran pendapatan menggunakan dasar pengukuran histories berdasarkan nilai wajar imbalan yang akan diterima. Pelaporan pendapatan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Pengungkapan pendapatan diungkapkan menurut pos pendapatan masing-masing.

Kata kunci: Pendapatan, PSAK No 23, pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan

ABSTRACT

ANALYSIS OF ACCOUNTING TREATMENT OF INCOME FROM POSTPAID ELECTRICITY SALES AT PT PLN (PERSERO) IN THE REGION OF SULSELRABAR BASED ON PSAK NO.23

**NERSIANA POLE
YASMI**

The purpose of this study was to determine whether the accounting treatment of income at PT PLN (Persero) in the Region of Sulselrabar was in accordance with PSAK No.23. The method used is a qualitative descriptive method where data that has been collected, then compiled and analyzed provides an overview related to postpaid electricity sales revenue and draws conclusions based on the data that has been obtained. While the data sources used are primary data and secondary data.

The results of the study show, that the accounting treatment at PT PLN (Persero) in the Region of Sulselrabar starts from the recognition, measurement, presentation and disclosure in accordance with PSAK No.23. Where revenue recognition uses the accrual basis method. Income measurement uses a historical measurement basis based on the fair value of the benefits to be received. Income reporting is reported in the income statement. Disclosure of income is disclosed according to their respective income posts.

Keywords: *Income, PSAK No.23, Recognition, Measurement, Presentation, Disclosure*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.4.1 Kegunaan Teoritis	5
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Akuntansi.....	6
2.2 Pengertian Pendapatan dan Jenis Pendapatan.....	7
2.3 Perlakuan Akuntansi Pendapatan	10
2.3.1 Pengakuan Pendapatan	11
2.3.2 Pengukuran Pendapatan	14
2.3.3 Pelaporan Pendapatan	16
2.3.4 Pengungkapan Pendapatan	17
2.4 Penjualan Listrik Pascabayar	17
2.5 Kerangka Pemikiran.....	19
2.6 Tinjauan Empirik	21

BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Rancangan Penelitian	22
3.2 Kehadiran Peneliti	22
3.3 Lokasi Penelitian	23
3.4 Jenis dan Sumber Data	23
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.5.1 Wawancara	24
3.5.2 Dokumentasi	24
3.6 Analisis Data	25
3.7 Tahap – Tahap Penelitian.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	27
4.1.1 Visi dan Misi Perusahaan	29
4.1.2 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar	30
4.1.3 Tugas dan Tanggung Jawab PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar	31
4.1.4 Sumber dan Jenis Pendapatan	40
4.2 Hasil Penelitian	40
4.2.1 Pengelolaan Penjualan Energi Listrik Pascabayar	40
4.2.2 Pengakuan Pendapatan Penjualan Pascabayar.....	41
4.2.3 Pengukuran Pendapatan Penjualan Pascabayar	42
4.2.4 Pelaporan dan Penyajian Pendapatan Pascabayar	43
4.2.5 Pengungkapan Pendapatan Pascabayar.....	45
4.3 Pembahasan	46
4.3.1 Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan	46
4.3.2 Pengakuan Pendapatan	46
4.3.3 Pengukuran Pendapatan	47
4.3.4 Pelaporan dan Penyajian Pendapatan.....	47
4.3.5 Pengungkapan Pendapatan	48
4.4 Hasil Analisis	50
BAB V PENUTUP	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Tinjauan Empirik	21
4.1 Laporan Laba/Rugi Penghasilan Komprehensif.....	44
4.2 Perbandingan Perlakuan Akuntansi	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.5 Kerangka Pemikiran	19
4.1 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar..	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Akun Pendapatan.....	56
2. Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif (sifat)	60
3. Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.....	61
4. Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensi Fungsi.....	62
5. Foto Wawancara	63
6. Gedung PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Listrik merupakan salah satu kebutuhan hal yang paling pokok yang mendasar bagi masyarakat sebagai tenaga pendukung dalam menjalankan aktivitasnya. Listrik menjadikan manusia ketergantungan akan keberadaannya, tidak dapat dipungkiri bahwa listrik sangat dibutuhkan manusia dalam segala hal yang mendukung aktivitas manusia. Tanpa adanya listrik maka aktivitas manusia akan terhenti karena hampir semua sarana dan prasarana yang digunakan manusia dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dan melaksanakan rutinitas sehari-hari dengan memakai listrik.

PT PLN (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang pendistribusian listrik. Status perusahaan persero adalah berbadan hukum serta diberikan kebebasan untuk bekerja sama dengan pihak swasta. Pencarian profit oleh PLN nantinya ditujukan ke pelayanan kepada masyarakat dan kembali untuk kepentingan negara. Perusahaan ini berada di bawah Departemen Pengembangan Energi Republik Indonesia dan bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga listrik bagi masyarakat secara terus menerus dan merata di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan mutu, keandalan, dan keamanan yang memadai dan dalam jumlah yang cukup, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mendorong peningkatan dalam kegiatan ekonomi.

Pendapatan merupakan kunci utama dalam perkembangan PT PLN (Persero). Sebelum membahas lebih lanjut tentang perlakuan akuntansi terhadap

pendapatan, berikut ini adalah pengertian tentang pendapatan menurut Hery (2013:36) mengemukakan pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) yang disebabkan oleh pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.

Pendapatan merupakan komponen terpenting dalam laporan keuangan, khususnya pada laporan laba rugi PT PLN (Persero). Pendapatan ini disajikan sebagai akun utama dalam laporan laba rugi. Dalam akuntansi pendapatan permasalahan utama adalah pada saat pengakuan itu diakui. Permasalahan ini akan terus muncul bila terjadi transaksi yang berhubungan dengan pendapatan. Pengakuan perlu dilakukan pada saat yang tepat atas suatu kejadian ekonomi yang menghasilkan pendapatan. Jumlah pendapatan yang dihasilkan perusahaan harus diukur dengan pasti. Analisa yang baik akan membantu perusahaan dalam kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Jika perusahaan keliru dalam menentukan pendapatan maka akan mengakibatkan salah dalam pengambilan keputusan.

Kesalahan dalam pengambilan kebijakan dalam mengelola dan mengakui pendapatan akan mempengaruhi jumlah nominal yang ada di laporan laba/rugi, sehingga pihak yang membacanya tidak mendapatkan informasi yang relevan. Oleh karena itu perusahaan harus menerapkan aturan atau prosedur yang logis serta konsisten untuk pencatatan, pengakuan dan pengukuran pendapatan, sehingga laporan laba/rugi komprehensif dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya selama periode tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan diatas maka disusunlah Standar Akuntansi Keuangan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar ini berlaku di Indonesia dan merupakan pedoman resmi yang digunakan perusahaan dalam

penyajian laporan keuangan. Dalam standar akuntansi keuangan akuntansi memuat tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan. Dengan adanya standar akuntansi keuangan, maka laporan laba rugi perusahaan dapat dipercaya kebenarannya.

PT PLN (Persero) Sulselrabar adalah perusahaan yang bergerak pada bidang jasa. Perusahaan ini melayani jasa pelayanan listrik. Masalahnya apakah penerapan akuntansi pada pengakuan dan pengukuran pendapatan oleh perusahaan sudah tepat dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Menurut PSAK No. 23 (2015) pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomik yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus kas masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Hal ini menjadi sangat penting karena pada kenyataannya jika pengakuan pendapatan tidak tepat maka dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan salah penyajian yang dikhawatirkan dapat menyebabkan para pengguna informasi keuangan salah dalam pengambilan keputusan.

Dalam menunjang kegiatan pendistribusiannya, PT PLN (Persero) memiliki kantor distribusi yang berada diseluruh provinsi di Indonesia, salah satunya PT PLN (Persero) distribusi khususnya Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar), yang bertanggung jawab atas pengawasan, pengkajian dan analisis sistem dan kinerja seluruh unit pelaksan induk/unit area yang berada di wilayah cakupannya. Sumber pendapatan utama PT PLN (Persero) adalah dari penjualan tenaga listrik dan penerimaan dari setiap badan dan perorangan untuk pembayaran jasa-jasa yang diberikan oleh PT PLN (Persero). Perhitungan pendapatan dari penjualan listrik dihitung berdasarkan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang telah ditetapkan berdasarkan jumlah KWH listrik yang dijual.

Penjualan listrik pascabayar merupakan bagian paling besar dari pendapatan PT PLN. PT PLN bergerak dibidang penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat. Pendapatan penjualan listrik pascabayar adalah sejumlah nilai yang harus dilunasi pelanggan sesuai rekening dengan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berlaku. Pada listrik pascabayar pelanggan dapat menggunakan energi listrik terlebih dahulu dan melakukan pembayaran satu bulan kemudian ketika diterbitkan tagihan sesuai dengan jumlah pemakaian. Apabila pelanggan tidak melakukan pembayaran pada tanggal tersebut maka akan dikenakan Biaya Keterlambatan (BK) sesuai dengan tarif dan daya yang tersambung.

Mengingat pentingnya arti pendapatan bagi perusahaan. Masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran, pelaporan dan pengungkapan pendapatan listrik seperti terjadinya penunggakan listrik dari sistem pascabayar yang mempengaruhi laporan laba rugi khususnya pada pendapatan. Hal ini tentunya membutuhkan berbagai macam pertimbangan perusahaan agar dapat mengakui pendapatan dengan andal atas jasa yang diberikan serta dapat mencerminkan jumlah pendapatan yang dihasilkan setiap periode. Pendapatan dari penjualan listrik dari tahun ke tahun bertambah, sehingga diperlukan perlakuan akuntansi yang tepat untuk pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan. Pendapatan dari penjualan listrik terbanyak adalah dari penjualan listrik pascabayar. PT PLN (Persero) menekankan pada pembahasan atas perlakuan pendapatan dari penjualan listrik yang dilakukan secara kredit atau sistem pascabayar dan pendapatan usaha lainnya, seperti pendapatan atas jasa penyambungan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah skripsi yang berjudul "Analisis perlakuan akuntansi terhadap pendapatan atas penjualan listrik pascabayar pada PT PLN (Persero) wilayah Sulselrabar".

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, “apakah perlakuan akuntansi terhadap pendapatan yang diterapkan oleh PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar sesuai dengan PSAK No 23?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan “untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi terhadap pendapatan atas penjualan listrik pascabayar pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar telah sesuai dengan PSAK No. 23”.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan, serta pemahaman mengenai perlakuan akuntansi terhadap pendapatan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi PT PLN (Persero), diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, dan tambahan informasi dalam memahami perlakuan terhadap pendapatan atas penjualan listrik.
2. Bagi Universitas Fajar, sebagai acuan referensi berikutnya dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis perlakuan akuntansi terhadap pendapatan atas penjualan listrik pascabayar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi dapat dipahami sebagai suatu proses kegiatan dalam mengelola data keuangan (input) agar menghasilkan informasi keuangan (output) yang bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan dengan perusahaan atau organisasi ekonomi yang bersangkutan. Bagian dari akuntansi berfokus pada penyajian informasi berupa laporan keuangan.

Secara umum akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, mengkomunikasikan, peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasinya. Proses akuntansi menghasilkan informasi keuangan. Semua proses tersebut diselenggarakan secara tertulis dan berdasarkan bukti transaksi yang juga harus tertulis. (Samryn, 2014:3)

Menurut *American Accounting Association* dalam Soemarso (2004:3) mendefenisikan akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Definisi ini mengandung dua pengertian, yakni :

1. Kegiatan akuntansi

Bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi.

2. Kegunaan akuntansi

Bahwa informasi akuntansi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan

berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.

Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi (*economic information*) dari suatu kesatuan ekonomi (*economic entity*) kepada pihak – pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut Bahri (2016:2) Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis, dari segi isi, berdasarkan standar yang diakui secara umum.

Dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data transaksi yang fungsinya untuk memberi informasi keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Akuntansi itu menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu dan ukuran moneter yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan. Akuntansi juga merupakan sesuatu yang menghasilkan informasi mengenai aktivitas ekonomi dalam sebuah laporan yang akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan atas suatu transaksi agar dapat melihat kondisi suatu perusahaan.

2.2 Pengertian Pendapatan dan Jenis Pendapatan

Pada umumnya, pendapatan berasal dari penjualan barang dagangan, pemberian jasa, penyewaan properti dan pemberian pinjaman uang. Pendapatan biasanya akan menyebabkan kenaikan aset, pendapatan dapat berasal dari dari berbagai sumber dan disebut dengan berbagai istilah, bergantung pada sifat bisnisnya.

Menurut Soemarso (2002:54) pendapatan (*revenue*) adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual. Pendapatan dapat juga didefinisikan sebagai kenaikan bruto dalam modal (biasanya melalui

diterimanya suatu aktiva dari langganan) yang berasal dari barang dan jasa yang dijual. Sedangkan menurut Samryn (2014:7) pendapatan merupakan nilai monoter dari pengalihan hak atas barang atau jasa melalui transaksi penjualan kepada pelanggan. Pendapatan pada umumnya menambah jumlah kekayaan, atau bisa juga mengurangi piutang, aktiva lain, atau kompensasi dengan utang tergantung dari sistem pembayaran yang disepakati dengan pelanggan. Jika pembayaran tidak berupa uang tunai maka alat pembayaran tersebut harus dinilai terlebih dahulu dengan mata uang dan nilainya disepakati oleh pihak pembeli dan penjual.

Menurut Sujarweni (2016:30) pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban perusahaan, yang berasal dari penjualan barang atau jasa pada suatu periode akuntansi. Untuk perusahaan jasa pendapatan itu berasal dari penyerahan jasa. Untuk perusahaan dagang pendapatan itu berasal dari penyerahan barang dagangan. Untuk perusahaan manufaktur pendapatan itu berasal dari penyerahan barang hasil produksi. Umumnya pendapatan untuk perusahaan manufaktur dan dagang menggunakan istilah penjualan sedangkan istilah pendapatan usaha/jasa umumnya digunakan untuk menyatakan pendapatan di perusahaan jasa.

Dalam PSAK 23 tentang pendapatan, dapat diartikan sebagai berikut :

“Penghasilan didefinisikan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai peningkatan manfaat ekonomik selama suatu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga dividen,

royalti, dan sewa. Tujuan ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi tertentu. Permasalahan utama dalam akuntansi untuk pendapatan adalah menentukan saat pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dan manfaat ini dapat diukur dengan andal. Pernyataan ini mengidentifikasi keadaan yang memenuhi kriteria tersebut agar pendapatan dapat diakui”.

Jenis pendapatan menurut Bahri (2016 : 25)

1. Pendapatan usaha

Pendapatan usaha (*operating revenue*), yaitu pendapatan yang berasal dari kegiatan pokok perusahaan yaitu pendapatan dari penjualan jasa atau barang dagangan.

2. Pendapatan nonusaha

Pendapatan nonusaha (*nonoperating revenue*), yaitu pendapatan yang berasal dari kegiatan di luar usaha pokok, misalnya pendapatan dividen, pendapatan bunga, dan pendapatan sewa.

Jenis pendapatan menurut PSAK No.23, adalah sebagai berikut :

1. Penjualan barang

Barang meliputi barang yang diproduksi perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali, seperti barang dagang yang dibeli pengecer atau tanah dan properti lain yang dibeli untuk dijual kembali.

2. Penjualan jasa

Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas yang secara aktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu yang disepakati oleh perusahaan. Jasa tersebut dapat diserahkan selama satu periode atau selama lebih dari satu periode. Beberapa kontrak penjualan

jasa yang timbul dari kontrak konstruksi, misalnya, kontrak penjualan jasa mengenai manajer proyek dan arsitek, tidak dibahas dalam pernyataan ini.

3. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen

Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain menimbulkan pendapatan dalam bentuk :

- a. Bunga yaitu pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah terhutang kepada perusahaan,
- b. Royalti yaitu pembebanan untuk penggunaan aktiva jangka panjang perusahaan, misalnya paten, merek dagang, hak cipta, dan perangkat lunak komputer dan,
- c. Dividen yaitu distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu.

2.3 Perlakuan Akuntansi Pendapatan

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.23 (2014) menyatakan pendapatan diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu nilai transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dengan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperoleh perusahaan.

Pendapatan adalah salah satu dasar sebagai beban pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Besarnya suatu pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap jumlah laba yang dapat dihasilkan oleh perusahaan. Laporan keuangan merupakan rincian dari proses

pencatatan yang bersumber dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama transaksi keuangan. Tujuan pengakuan pendapatan adalah untuk mengetahui seberapa besar pendapatan yang menjadi pendapatan pada periode tertentu.

2.3.1 Pengakuan Pendapatan

Pengakuan (*recognition*) adalah proses pencatatan item-item dalam ayat jurnal, dimana untuk setiap item yang diakui harus memenuhi salah satu definisi dari unsur laporan keuangan (Hery, 2013:37). Sedangkan menurut Samryn (2014:113), menyatakan dasar pengakuan pendapatan secara umum, ada dua cara yaitu :

1. Dasar akrual (*Accrual Basis*)

Metode ini dikenal sebagai alternative yang memungkinkan mengakui pendapatan sekalipun atas suatu penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan belum diikuti dengan penerimaan kas. Penggunaan metode ini menimbulkan adanya akun piutang untuk mencatat pendapatan yang belum diterima dalam bentuk kas. Namun demikian, kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan dengan dasar akrual tidak boleh menghalangi manajemen untuk melakukan penjualan dengan cara tunai. Atau tidak berarti bahwa ketika terdapat pelanggan yang melakukan pembelian secara tunai maka perusahaan harus mengubah kebijakan pengakuan pendapatan menjadi dasar kas.

Dasar akrual dapat mencakup pendapatan yang diterima secara tunai. Tetapi tidak berlaku sebaliknya untuk pengakuan pendapatan atas dasar kas. Kebijakan dasar kas tidak dapat mencakup transaksi penjualan kredit. Dalam pendekatan ini pendapatan tidak selalu sama dengan penerimaan kas. Sebaliknya penerimaan kas juga tidak selalu berarti pendapatan. Dalam sebuah perusahaan, penerimaan kas biasa berasal dari pelunasan piutang, penerimaan

uang pinjaman, setoran modal, titipan dari pihak lain, dan sebagainya. Demikian pendapatan dapat diakui.

2. Dasar kas (*Cash Basis*)

Suatu metode yang hanya mengakui pendapatan jika atas penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan sudah direalisasi dengan penerimaan kas. Secara konsep, dasar tunai ini mengakui apabila pendapatan yang hanya diperhitungkan berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas.

Berdasarkan PSAK No.23, pendapatan diakui dengan dasar sebagai berikut :

1. Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi :

- a) Entitas telah memindahkan dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli,
- b) Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual,
- c) Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara andal,
- d) Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas, dan
- e) Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal.

2. Penjualan Jasa

Jika hasil suatu transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan. Hasil transaksi dapat diestimasi secara andal jika seluruh kondisi berikut ini dipenuhi :

- a) Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal,
- b) Kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas,
- c) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal, dan
- d) Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal.

Pengakuan pendapatan dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari suatu transaksi sering disebut sebagai metode presentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan diakui dalam periode akuntansi pada saat jasa diberikan. Pengakuan pendapatan atas dasar ini memberikan informasi yang berguna mengenai tingkat kegiatan jasa dan kinerja dalam suatu periode.

Untuk tujuan praktis, bila jasa dilakukan melalui sejumlah kegiatan yang tidak dapat ditentukan selama suatu periode tertentu, maka pendapatan diakui atas dasar garis lurus selama periode tertentu tersebut, kecuali jika ada bukti bahwa terdapat metode lain yang lebih baik dalam mencerminkan tingkat penyelesaian. Jika kegiatan tertentu jauh lebih signifikan daripada kegiatan yang lain, maka pengakuan pendapatan ditunda sampai kegiatan yang signifikan tersebut dilakukan.

3. Bunga, Royalti, dan Dividen

Pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen diakui dengan dasar yang dijelaskan sebagai berikut :

- a) Bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif ,
- b) Royalti diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan dan,

- c) Dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Jika bunga yang belum dibayar telah diakui sebelum perolehan investasi (*investment*) yang berbunga, maka penerimaan bunga kemudian dialokasikan antara periode sebelum pembelian dan sesudah pembelian, hanya bagian setelah perolehan yang diakui sebagai pendapatan. Royalti diakui sesuai dengan syarat perjanjian yang relevan kecuali, dengan memperhatikan substansi perjanjian, akan lebih sesuai untuk mengakui pendapatan atas dasar sistematis dan rasional lain.

2.3.2 Pengukuran Pendapatan

Menurut PSAK 23, pengukuran pendapatan adalah sebagai berikut :

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara entitas dengan pembeli atau pengguna aset tersebut. Jumlah tersebut diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima dikurangi jumlah diskon usaha dan rabat volume yang diperbolehkan oleh entitas. Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Akan tetapi, jika arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, maka nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal dari kas yang diterima atau yang dapat diterima. Jika barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang serupa maka, pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai suatu transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Jika barang dijual atau jasa yang diberikan untuk dipertukarkan dengan barang dan jasa yang tidak serupa, maka pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan.

Pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang dialihkan. Jika nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima tidak dapat diukur secara andal, maka pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang diserahkan, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang dialihkan.

Menurut Hery (2013:38) mengenai kriteria pengukuran, ada lima dasar pengukuran yang digunakan dalam akuntansi, yaitu :

- a) Biaya historis (*historial cost*), yaitu harga tukar barang dan jasa pada saat tanggal pembelian. Contoh item yang diukur dengan biaya historis adalah tanah, bangunan, peralatan, dan kebanyakan persediaan.
- b) Biaya pengganti (*current replacement cost*), yaitu harga yang dibayarkan saat ini untuk membeli atau menggantikan barang atau jasa yang serupa. Contoh item yang diukur dengan biaya pengganti adalah beberapa persediaan yang mengalami penurunan nilai sejak diperoleh. Persediaan yang termasuk dalam kategori ini adalah persediaan dimana jenisnya terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi, sehingga dengan munculnya produk jenis baru akan membuat harga dari produk jenis sebelumnya menjadi turun.
- c) Nilai pasar (*current market value*), yaitu harga jual aktiva yang berlaku dipasar saat ini. Nilai ini merupakan *exit value*, dimana berbeda dengan biaya historis dan biaya pengganti yang merupakan *entry value* atau *input value*.
- d) Nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*), yaitu jumlah kas yang diperkirakan akan diterima dari konversi aktiva dalam kegiatan normal perusahaan. Contohnya nilai piutang yang kemungkinan besar dapat ditagih atau dikonversi menjadi kas.

- e) Nilai sekarang atau nilai yang di-diskontokan (*present/ discounted value*), yaitu jumlah bersih arus kas masuk atau arus kas keluar dimasa yang akan datang yang di-diskontokan ke nilai sekarang dengan nilai tingkat suku bunga tertentu.

2.3.3 Pelaporan Pendapatan

Menurut Hery (2013:39) Seperangkat utuh laporan keuangan tersebut harus melaporkan posisi keuangan pada akhir periode, laba bersih selama periode, arus kas selama periode, investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik selama periode, dan laba komprehensif selama periode. Posisi keuangan pada akhir periode digambarkan lewat neraca, sedangkan laba bersih selama periode akan terungkap lewat laporan laba rugi, dan besarnya arus kas selama periode akan disajikan lewat laporan arus kas. Investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik selama periode akan diikhtisarkan dalam laporan perubahan modal pemilik. Laporan laba komprehensif berisi ikhtisar seluruh kenaikan dan penurunan ekuitas, tidak termasuk perubahan yang diakibatkan oleh investasi pemilik dan distribusi kepada pemilik. Laba komprehensif berbeda dengan laba bersih, dimana dalam laba komprehensif ini termasuk keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi. Jadi, laba komprehensif ini terdiri atas laba bersih dan keuntungan serta kerugian yang belum direalisasi.

Pendapatan yang telah diukur dan diakui akan dimasukkan dalam laporan keuangan, pada dasar kas, pendapatan dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode dimana kas diterima atau dibayar. Sedangkan pada dasar akrual, pendapatan dilaporkan dalam laporan laba rugi periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Pada dasar akrual, beban dan pendapatan yang saling terkait dilaporkan pada periode yang sama. Konsep akuntansi yang mendukung pelaporan pendapatan dan beban terkait pada periode yang sama disebut

konsep perbandingan atau pengaitan. Dalam konsep ini, laporan laba rugi akan melaporkan laba atau rugi untuk periode tersebut. Agar pelaporan keuangan menjadi lebih efektif, seluruh informasi yang relevan seharusnya disajikan dengan cara tidak memihak, dapat dipahami, dan tepat waktu.

2.3.4 Pengungkapan Pendapatan

Menurut PSAK No. 23, entitas mengungkapkan yaitu :

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa,
- b. Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut, termasuk pendapatan yang berasal dari :
 - 1) Penjualan barang
 - 2) Penjualan jasa
 - 3) Bunga
 - 4) Royalti
 - 5) Dividen
- c. Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori yang signifikan dari pendapatan.

2.4 Penjualan Listrik Pascabayar

Pendapatan perusahaan berasal dari penjualan dan juga merupakan aktivitas utama yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Menurut Hery (2013), penjualan merupakan total jumlah yang dibebankan kepada pelanggan atas barang dagangan yang dijual perusahaan, baik meliputi penjualan tunai maupun penjualan secara kredit. Sedangkan menurut Susanto (2004) aktivitas penjualan adalah sebagai berikut :

1. Aktivitas penjualan merupakan sumber pendapatan perusahaan. Kurang dikelolannya aktivitas penjualan dengan baik, secara langsung akan merugikan perusahaan karena selain sasaran penjualan tidak tercapai, juga pendapatan akan berkurang.
2. Pendapatan dan hasil penjualan merupakan sumber pembayaran perusahaan maka perlu diamankan.
3. Akibat adanya penjualan akan merubah posisi harta yang menyangkut :
 - a) Timbulnya piutang jika penjualan secara kredit.
 - b) Kuantitas barang yang akan berkurang dari gudang karena penjualan yang terjadi.

Sistem penjualan listrik pascabayar adalah sistem penjualan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) yaitu dengan memberikan pelayanan (jasa) terlebih dahulu baru setelah itu dilakukan penagihan sesuai dengan jasa yang diberikan. Listrik pascabayar adalah transaksi pemakaian tenaga listrik yang menggunakan meteran elektronik pascabayar dengan cara pembayaran diakhir. Pada listrik pascabayar pengguna diperbolehkan membayar tagihan setelah menggunakan layanan listrik PLN. Berikut ini adalah prosedur penjualan listrik pascabayar secara umum pada PT PLN (Persero) :

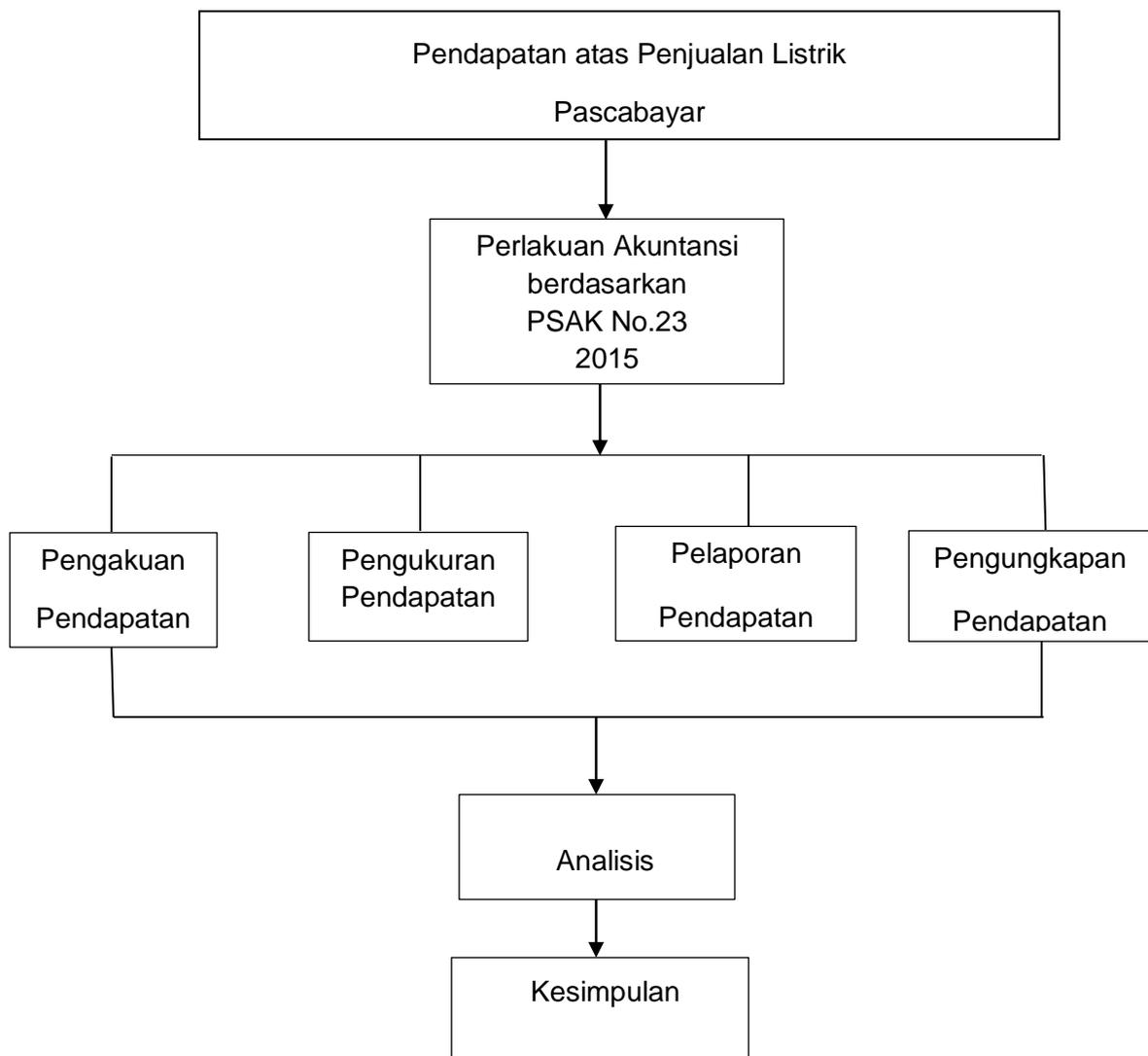
- a. Besarnya rekening listrik yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan tergantung pada besarnya pemakaian listrik dalam satu bulan.
- b. Setiap bulan, mulai tanggal 17 sampai dengan tanggal 2 petugas melakukan pembacaan meter ditempat pelanggan.
- c. Hasil pembacaan meter kemudian diperiksa/koreksi untuk memastikan bahwa datanya telah sesuai.
- d. Hasil pembacaan meter yang telah diverifikasi diproses menjadi data pemakaian kwh dan kemudian dikirim kebagian pengelolaan rekening untuk pembuatan rekening listrik.

- e. Pembayaran listrik pascabayar dapat dilakukan di loket pelayanan listrik PT PLN (Persero) yang disediakan, kantor pos, dan atm.
- f. Namun pada listrik pascabayar terdapat biaya beban, dan saksi pemutusan. Pelanggan yang tidak membayar rekening bulanan setelah waktu tertentu, dilakukan pemutusan penyambungan dan apabila terlambat membayar rekening bulanan akan dikenakan denda keterlambatan. Kelebihan dalam menggunakan listrik pascabayar adalah ketersediaan listrik setiap saat.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat ditunjukkan oleh model gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka pemikiran



Jumlah peningkatan penggunaan listrik dari tahun ke tahun menjadi penyebab PT PLN (Persero) berupaya dalam peningkatan kualitas layanan terbaik untuk masyarakat. Layanan listrik pascabayar merupakan bentuk pelayanan PT PLN (Persero) dalam menjual listrik dengan cara, pelanggan menggunakan listrik terlebih dahulu kemudian membayar tagihan sesuai dengan pemakaian listrik yang telah digunakan. Sumber pendapatan PT PLN (Persero) salah satunya adalah dari pendapatan penjualan listrik pascabayar. PSAK No.23 mengatur tentang pendapatan khususnya transaksi atas peristiwa ekonomi yang timbul dari penjualan barang, penjualan jasa, dan penggunaan aktiva lainnya berupa bunga, royalty, dan dividen.

Kerangka kerja konseptual FASB telah memberikan pedoman (arahan) yang jelas dalam menentukan informasi apa yang seharusnya masuk dalam laporan keuangan. Kerangka kerja ini terdiri dari konsep-konsep yang akan dipakai untuk mengimplementasikan tujuan pelaporan keuangan. Konsep-konsep tersebut meliputi kriteria, pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan pelaporan. Konsep ini akan menjelaskan bagaimana unsur-unsur laporan keuangan harus diakui, diukur, dicatat, dan dilaporkan oleh perusahaan.

PSAK No.23 sangat berperan penting dalam perusahaan untuk mengetahui perlakuan akuntansi. Pengakuan adalah saat dimana sebuah transaksi harus diakui sebagai pendapatan, setelah diakui sebagai pendapatan, perusahaan kemudian mengukur berapa jumlah yang harus dilaporkan, dan diungkapkan dari setiap transaksi dalam suatu periode akuntansi. Permasalahan pengakuan, pengukuran, pelaporan dan pengungkapan pendapatan terkait erat satu sama lain.

2.6 Tinjauan Empirik

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Narida Prameita Chadani (2015)	Analisis pengakuan pendapatan pada PT PLN (Persero) area Surabaya Utara	Laporan keuangan PT PLN (Persero) area Surabaya Utara menunjukkan hasil yang sebenarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan PSAK No.23
2	Synthia Marcella (2013)	Analisis pengakuan dan pengukuran pendapatan berdasarkan PSAK No 23 pada PT Pandu Siwi Sentosa Palembang	Pengukuran dan pendapatan PT Pandu Siwi Sentosa Palembang telah sesuai dengan standar PSAK 23
3	Vivi Octaviani (2014)	Analisis pengelolaan penjualan energi listrik pascabayar dan prabayar pada B'right PLN Batam	B'right PT PLN Batam melakukan pengakuan dan pencatatan yang berbeda pada penjualan energi listrik pascabayar dan prabayar, pascabayar menggunakan metode accrual basis dan prabayar menggunakan cash basis Pengakuan dan pencatatan yang dilakukan PT PLN Batam sudah sesuai dengan PSAK 23 tentang pendapatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sedarmayanti dan Hidayat (2002:33), metode deskriptif adalah suatu metode dalam pencarian fakta status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang terjadi kemudian melalui data untuk menemukan faktor yang mendahului atau menentukan kemungkinan sebab atas peristiwa yang diteliti. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam. Pendekatan kualitatif bertujuan agar penelitian ini dapat menganalisis perlakuan akuntansi yang diterapkan pada PT PLN Sulselrabar khususnya pendapatan atas penjualan listrik pascabayar pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar.

3.2 Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti akan bertindak sebagai instrument sekaligus peneliti sebagai pengumpul data. Peran peneliti adalah sebagai pengamat penuh. Kehadiran peneliti ini memiliki status yang diketahui oleh subjek atau informan.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 06 Juni 2018 pada PT PLN Wilayah Sulselrabar yang berlokasi di Jl.Letjen Hertasning, Bok B Panakkukang Makassar.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan, data kuantitatif ini terbagi dalam dua kelompok, pertama, data diskrit yaitu data yang diperoleh melalui hasil proses menghitung/membilang, dan kedua, data kontinu yaitu data yang diperoleh melalui proses mengukur.

2. Data kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berbentuk bukan bilangan. Penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek yang alami, peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif dan penelitian ini lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Adapun sumber data pada penelitian ini terdiri dari 2 (dua) bagian, adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016:62). Data primer yang berhubungan dengan penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar seperti perlakuan akuntansi terhadap pendapatan atas penjualan listrik. Data primer yang diperlukan peneliti

yaitu penjelasan mengenai pengakuan, pengukuran, pengungkapan hingga pelaporan pendapatan atas penjualan listrik pascabayar.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder ini diperoleh dari catatan, buku dan sebagainya yang mendukung dalam penulisan ini. Pada penelitian ini data sekunder diperlukan oleh peneliti yaitu berupa laporan yang menunjukkan penyajian pendapatan atas penjualan listrik pascabayar.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah teknik wawancara secara langsung, observasi, dan dokumentasi. Adapun metode dalam teknik pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut :

3.5.1 Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:72) wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara merupakan proses pengumpulan data yang memperoleh informasi langsung dari sumbernya dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada ibu IIN selaku supervisor bidang akuntansi PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar Makassar yang terkait dengan hal-hal dengan masalah yang dibahas.

3.5.2 Dokumentasi

Peneliti akan mengumpulkan data melalui dokumen atau arsip yang dimiliki perusahaan terkait dengan pendapatan atas penjualan listrik pascabayar. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa

berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. (Sugiyono 2016:82).

3.6 Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016:89) Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis deskriptif yaitu :

- 1) Reduksi data yaitu, mengumpulkan data-data yang telah didapat baik berupa data primer maupun data sekunder yang terkait dengan penelitian, data yang diperoleh dari lapangan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Melakukan analisis data melalui reduksi data, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.
- 2) Display data atau penyajian data yaitu, penyajian yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya yang bersifat naratif yang disusun ke dalam urutan sehingga strukturnya dapat dipahami.
- 3) Membandingkan perlakuan akuntansi terhadap pendapatan pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar dengan PSAK No.23 tentang pendapatan.

- 4) Menganalisis data yaitu cara untuk mengolah data untuk memperoleh gambaran yang terkait dengan penelitian dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah didapat.

3.7 Tahap - Tahap Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti melakukan tahap–tahap yaitu:

1. Tahap prapenelitian :
 - a) Menyusun rancangan penelitian /proposal
 - b) Survei awal keadaan tempat penelitian
 - c) Menyurat izin penelitian
2. Tahap penelitian :
 - a) Memahami latar penelitian dan persiapan diri
 - b) Memasuki lokasi penelitian
 - c) Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan penelitian
3. Tahap Analisis Data

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar Cabang Makassar mempunyai luas wilayah kerja 5.372,4 km², yang meliputi, Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar, dengan total 35 unit kerja, masing-masing terdiri dari 4 unit Rayon, 6 unit Ranting, 15 unit jaga dan 11 unit Lisdes. Semua wilayah tersebut mendapatkan suplai tenaga listrik dari 12 Gardu Induk tersebar yang dihubungkan dari sistem Sulsel dengan jaringan Transmisi 150, 70 dan 30 KV. Beban puncak pada sistem Sulsel yang mencatat wilayah kerja Cabang Makassar sebesar 222 MW. Selain dari sistem Sulsel, PT PLN (Persero) Wilayah Sulsel-Sultra atau biasa disebut dengan Wilayah Sulselrabar Cabang Makassar mensuplai masyarakat kepulauan dengan pembangkit (dissel/solated) pada 11 pulau yang tersebar di Makassar, Kabupaten Pangkep dan Takalar. Berikut merupakan tahun-tahun penting dalam sejarah kelistrikan pada PLN (persero) Wilayah Sulselrabar.

Tahun 1914 perusahaan ketenagaan listrik di Kota Makassar dan sekitarnya sudah ada sejak zaman Belanda di Indonesia. Saat itu penyediaan tenaga listrik dikelola oleh suatu lembaga yang disebut *Electricitit Weizen*. Konon pembangkit listrik di Kota Makassar yang pertama kali terpasang yaitu sekitar tahun 1914 dengan menggunakan mesin uap yang berlokasi di pelabuhan Makassar. Sejalan dengan pertumbuhan kota yang diikuti dengan meningkatnya kebutuhan akan tenaga listrik, pada tahun 1925 dibangun Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) di tepi Sungai Jeneberang daerah Pandang-pandang Sungguminasa. PLTU tersebut berkapasitas 2000KW. Sejarah mencatat bahwa

PLTU Pandang-pandang Sungguminasa ini hanya mampu beroperasi hingga tahun 1997.

Tahun 1946 di bangun Pusat Listrik Tenaga Dissel (PLTD) yang berlokasi di bekas lapangan sepak bola Bantoala. Kedua pembangkit listrik tersebut yaitu PLTU Pandang-pandang Sungguminasa dan PLTD Bantoala oleh *N.V Nederlands Gas Electriciteit Maatschappy (N.V.NEGEM)* pada tahun 1949 seluruh pengelolaanya ini dialihkan ke *N.V Ovesseese Gas dan Electridan Maatschappy (N.V.NEGEM)*. Tahun 1957 pengesahaan ketenagaan listrik di Kota Makassar di nasionalisasi oleh pemerintah RI dan dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) Makassar namun wilayah operasi terbatas hanya di Kota Makassar dan daerah luar Kota Makassar antara lain Majene, Bantaeng, Bulukumba, Watampone, dan Palopo untuk pusat pembangkitnya ditangani oleh PLN cabang luar Kota dan pendistribusinya oleh PT. MPS (Maskapai untuk perusahaan-perusahaan setempat). PLN Makassar inilah kelak merupakan cikal bakal PT.PLN (Persero) Wilayah VIII sebagaimana yang kita kenal saat ini.

Tahun 1961 PLN pusat membentuk unit PLN Exploitasi VI dengan wilayah kerja meliputi Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Makassar. Dan Tahun 1973 berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 01/PRT/1973 tentang struktur organisasi dan pembagian tugas perusahaan umum. PLN Exploitasi VI berubah menjadi PLN Exploitasi VIII. Tahun 1975 Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Mengeluarkan Peraturan Menteri No 013/PRT/1975 sebagai pengganti Peraturan Menteri No. 01/PRT/1973 yang didalamnya disebutkan bahwa perusahaan mempunyai unsur pelaksanaan yaitu proyek PLN wilayah. Oleh karena itu, direksi Perum Listrik Negara menetapkan SK No 010/DIR/1976 yang mengubah sebutan PLN Exploitasi menjadi PLN Wilayah VIII, dan pada tahun

1994 berdasarkan PP No 23 1994 maka status PLN wilayah VIII berubah menjadi persero maka juga berubah namanya menjadi PT.PLN (Persero) Wilayah VIII. Perubahan ini mengandung bahwa PLN semakin dituntut dapat meningkatkan kinerjanya.

Tahun 2001 sejalan dengan kebijakan restrukturisasi sektor tenaga listrik, PT PLN (Persero) Wilayah VIII diarahkan menjadi *Strategic Business unit/investment centre* dan sebagai tindak lanjut, sesuai dengan keputusan direksi PT PLN (Persero) No 01/K/010/DIR/2001 tanggal 8 Januari 2001, PT PLN (Persero) Wilayah VIII berubah menjadi bisnis Sulawesi Selatan dan Tenggara 11. Pada tahun 2006 berubah menjadi PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat atau disingkat dengan Wilayah Sulselrabar yang bertempat di Jl. Hertasing, Blok B, Panakukang, Pandang Makassar, Sulawesi Selatan.

4.1.1 Visi Dan Misi Perusahaan

Visi Perusahaan

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.

Misi perusahaan

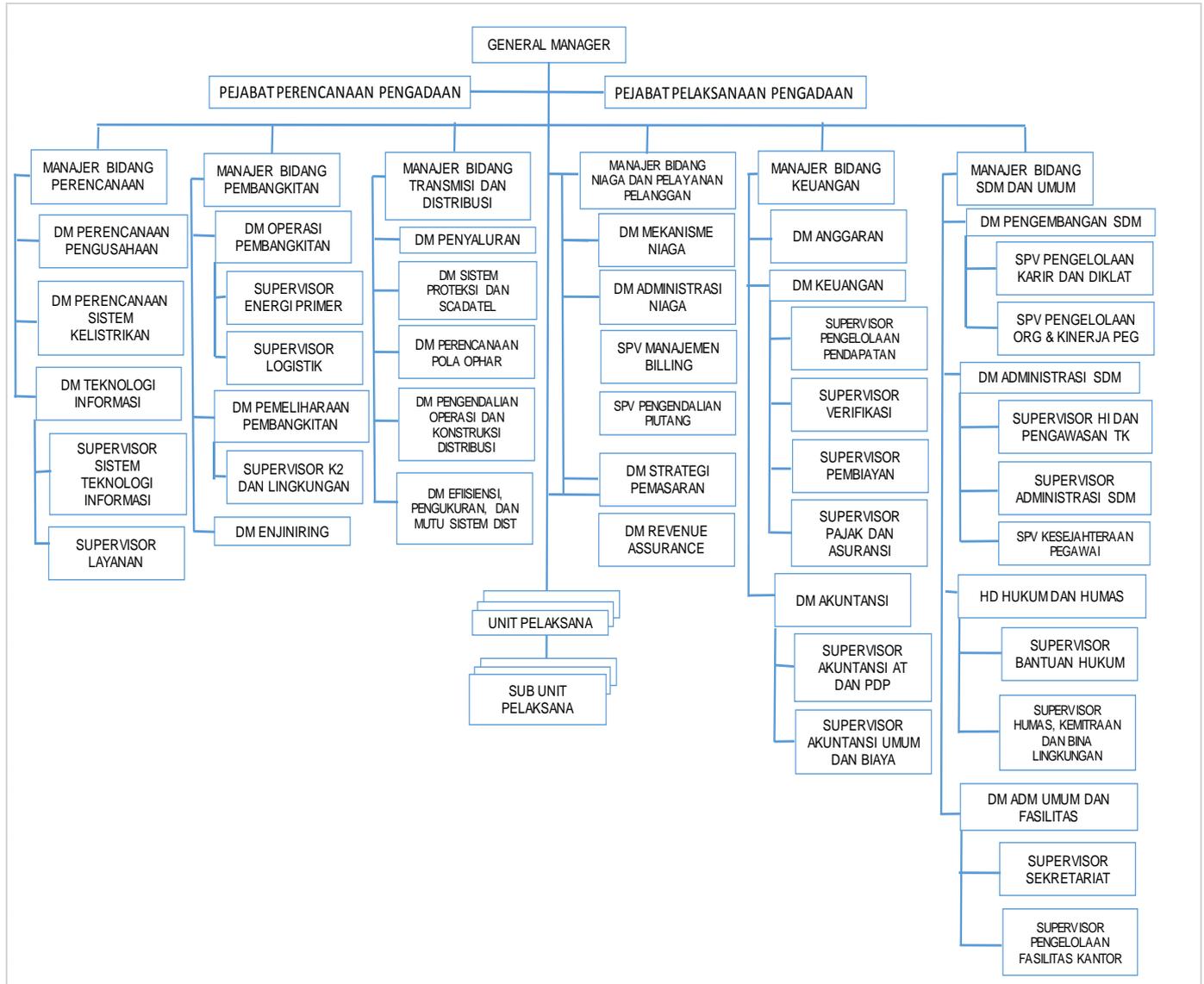
Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Motto

Listrik untuk kehidupan yang lebih baik (*Electricity for a better future*)

4.1.2 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar

Gambar 4.1
Struktur organisasi unit induk PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar



4.1.3 Tugas dan Tanggung Jawab PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar

1. General Manajer

Bertanggung jawab atas pengadaan usaha, melalui optimalisasi seluruh sumber daya secara efisien, efektif dan sinergis serta menjamin penerimaan hasil penjualan tenaga listrik, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan profit serta iklim kerja yang produktif.

2. Pejabat Perencana Pengadaan

Pejabat struktural yang bertugas dan bertanggung jawab dalam perencanaan pengadaan barang/jasa atau pejabat struktural yang memiliki tugas pokok.

3. Pejabat Pelaksana Pengadaan

Bertanggungjawab dalam menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan, menyiapkan dokumen pengadaan, mengumumkan pengadaan barang/jasa dan memberikan tanggapan serta informasi mengenai pengadaan barang/jasa yang berada dalam batas kewenangannya.

4. Manajer Bidang Perencanaan

Bertanggung jawab atas tersusunnya perencanaan kerja, sistem manajemen kerja, perencanaan investasi dan pengembangan aplikasi sistem informasi untuk mendukung upaya perusahaan tenaga listrik yang memiliki efisiensi, mutu dan keandalan yang baik serta upaya pencapaian sasaran dan ketersediaan kerangka acuan pelaksanaan kerja. Adapun devisi bidang perencanaan sebagai berikut :

- a. DM Perencanaan Perusahaan
- b. DM Perencanaan Sistem Kelistrikan
- c. DM Teknologi Informasi
- d. Supervisor Sistem Teknologi Informasi
- e. Supervisor Layanan Database

Tugas bidang perencanaan dan devisi-devisinya sebagai berikut:

- 1) Menyusun perencanaan wilayah
 - 2) RUPTL (Rencana Umum Pengembangan Tenaga Listrik)
 - 3) RJP (Rencana Jangka Panjang)
 - 4) RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan)
 - 5) Rencana pengembangan sistem tenaga listrikan :
 - a) Menyusun sistem manajemen kinerja unit-unit kerja
 - b) Menyusun metode evaluasi kelayakan investasi dalam melakukan penilaian finansialnya
 - c) Menyusun program pengembangan aplikasi sistem informasi
 - d) Menyusun dan mengelola manajemen mutu
 - e) Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik
 - f) Menyusun laporan manajemen di bidangnya.
5. Manajer Bidang Pembangkitan
- Bertanggung jawab atas penyusunan strategi, standar operasi dan pemeliharaan, standar desain konstruksi dan kebijakan manajemen termasuk keselamatan ketenagalistrikan untuk menjamin kontinuitas perusahaan tenaga listrik dengan efisiensi serta mutu dan keandalan yang baik dan dukungan logistik bagi operasional perusahaan tenaga listrik di unit pelaksana. Adapaun devisi bidang pembangkitan sebagai berikut :
- a. DM Operasi Pembangkitan
 - b. Supervisor Energi Primer
 - c. Supervisor Logistik
 - d. DM Pemeliharaan Pembangkitan
 - e. Supervisor K2 dan Lingkungan
 - f. DM Enjiniring

Tugas dari bidang pembangkitan dan devisi-devisinya sebagai berikut :

- a. Menyusun strategi pengoperasian dan pemeliharaan sistem pembangkit, transmisi dan jaringan distribusi serta membina penerapannya.
 - b. Menyusun standar untuk penerapan dan pengujian peralatan pembangkit, transmisi dan distribusi serta standar operasi dan pemeliharaan sistem pembangkit, transmisi dan jaringan distribusi.
 - c. Menyusun standar desain dan kriteria konstruksi pembangkit, transmisi, jaringan distribusi dan peralatan kerjanya serta membina penerapannya.
 - d. Melakukan pengendalian susut energi listrik dan gangguan pada sistem pembangkitan transmisi, distribusi serta saran perbaikannya.
 - e. Menyusun metode kegiatan konstruksi dan administrasi pekerjaan serta membina penerapannya.
 - f. Menyusun kebijakan manajemen sistem pembangkitan, transmisi dan jaringan distribusi.
 - g. Menyusun kebijakan manajemen pengadaan dan perbekalan pembangkitan, transmisi dan distribusinya serta membina penerapannya.
 - h. Menyusun kebijakan manajemen lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan serta membina penerapannya
 - i. Menyusun pengembangan sarana komunikasi dan otomatisasi operasi pembangkitan, transmisi dan jaringan distribusi
 - j. Menyusun, memantau dan mengevaluasi ketentuan data induk pembangkit, transmisi dan jaringan distribusi
 - k. Menyusun RKAP yang terkait dengan bidangnya
 - l. Menyusun laporan manajemen di bidangnya.
6. Manajer Bidang Transmisi dan Distribusi
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan pembuatan rencana kerja konstruksi, membuat SOP, merencanakan operasi dan pemeliharaan distribusi,

telekomunikasi, penerangan, pengendalian sistem meter (AMR), pengelolaan data aset jaringan distribusi (TM, TR, trafo distribusi, SR dan APP termasuk PDPJ), serta evaluasi pengelolaan distribusi yang dikelola oleh unit-unit.

Adapun devisi bidang transmisi dan distribusi sebagai berikut :

- a. DM Penyaluran
- b. DM Sistem Proteksi dan Scadatel
- c. DM Perencanaan Pola Ophar Sistem Distribusi
- d. DM Pengendalian Operasi dan Konstruksi Distribusi
- e. DM Efisiensi, Pengukuran, dan Mutu Sistem Dist

Tugas bidang transmisi dan distribusi dan devisi-devisi sebagai berikut :

- 1) Menyusun program kerja dan anggaran fungsi distribusi sebagai pedoman kerja
- 2) Melakukan analisa dan evaluasi neraca energi
- 3) Menyusun usulan rencana pengembangan sistem operasi distribusi
- 4) Menyusun SOP pekerjaan operasi, pemeliharaan dan pembangunan jaringan distribusi
- 5) Mengelola dan memonitor pengoperasian sarana pendistribusian tenaga listrik secara efektif dan efisien, dalam rangka menjaga kontinuitas serta menjamin mutu keandalan penyaluran tenaga listrik
- 6) Mengelola dan memonitor pelaksanaan inspeksi dan pengukuran jaringan untuk beban perencanaan, pemeliharaan, pengoperasian, sarana pendistribusian tenaga listrik
- 7) Mengelola dan memonitor asset jaringan distribusi
- 8) Mengelola, memonitor, dan mengevaluasi data aset jaringan distribusi (PDPJ) serta melakukan updating
- 9) Menganalisa dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pengaturan operasional jaringan distribusi

- 10) Mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan dalam keadaan bertegangan (PDKB) dan pemeliharaan APP pelanggaran besar (Daya >200kVA)
- 11) Mengelola, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peneraan, perakitan dan pemeliharaan APP (termasuk AMR)
- 12) Mengelola, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peneraan, perakitan dan pemeliharaan APP (termasuk AMR)
- 13) Mengelola, memonitor dan mengevaluasi susut distribusi
- 14) Melaksanakan koordinasi dengan fungsi terkait dalam pelaksanaan P2TL serta penyimpanan dokumen dan barang bukti penyalahgunaan tenaga listrik
- 15) Mengelola, memonitor dan mengevaluasi pelayanan/penanggulangan gangguan sistem distribusi tenaga listrik
- 16) Mengelola. Memonitor dan mengevaluasi pengoperasian dan pemeliharaan genset mobile serta pembangkit kecil (PLTMH) (bila ada)
- 17) Mengelola, memonitor dan mengevaluasi pemasangan, pengukuran, pemeliharaan, trafo, kapasitor dan proteksi distribusi
- 18) Mengelola, memonitor dan mengevaluasi penggunaan dan pemeliharaan radio komunikasi serta call center
- 19) Mengelola, memonitor dan mengevaluasi PK/SPK/kontrak yang berkaitan dengan bagian distribusi
- 20) Mengelola, memonitor dan mengevaluasi pembangunan jaringan distribusi (termasuk program listrik pedesaan dan hibah)
- 21) Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka pengembangan dan operasi sistem distribusi
- 22) Melaksanakan pengelolaan tata usaha gudang sesuai ketentuan
- 23) Membuat laporan rutin dan berkala sesuai dengan bidang tugasnya
- 24) Melaksanakan pembinaan terhadap UPJ sesuai dengan tugasnya

25) Melaksanakan hubungan dengan mitra kerja, lembaga pemerintah, swasta, tokoh masyarakat serta mass media sesuai dengan bidang tugasnya

26) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya

7. Manajer Bidang Niaga dan Pelayanan Pelanggan

Bertanggungjawab dalam menjamin penjualan tenaga listrik, pengembangan pemasaran dengan melakukan riset pasar/inovasi dalam pengembangan penjualan listrik dengan harga kompetitif yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan. Adapun divisi bidang niaga dan pelayanan pelanggan sebagai berikut :

- a. DM Mekanisme Niaga
- b. DM Administrasi Niaga
- c. SPV Manajemen Billing
- d. SPV Pengendalian Piutang
- e. DM Strategi Pemasaran
- f. DM Revenue Assurance

Tugas manajer bidang niaga dan pelayanan pelanggan dan divisi –divisinya sebagai berikut :

- 1) Mengevaluasi ketentuan dan strategi pemasaran penjualan energy dan rencana pendapatan
- 2) Mengevaluasi harga jual energi listrik
- 3) Mengevaluais biaya penyediaan tenaga listrik
- 4) Mengevaluasi harga jual tenaga listrik
- 5) Mengevaluasi strategi dan pengembangan pelanggan, standar, dan produk pelayanan
- 6) Mengevaluasi ketentuan data induk pelanggan dan data induk saldo
- 7) Mengevaluasi konsep kebijakan sistem informasi pelayanan pelanggan

- 8) Mengawasi pengendalian DIS dan opname saldo piutang
- 9) Mengkordinasi pelaksanaan penagihan kepada pelanggan tertentu antara lain TNI/POLRI dan instansi vertical
- 10) Mengkaji pengelolaan cebter dan menyusun rencana penyempurnaannya
- 11) Menyusun rencana interaksi antar unit pelaksana
- 12) Menyusun rencana pengembangan usaha serta pengaturannya
- 13) Membuat usulan RKAP yang terkait dengan bidanngnya.

8. Manajer Bidang Keuangan

Manajer keuangan bertanggung jawab menjamin terlaksananya pengelolaan manajemen keuangan yang mencakup, perencanaan, penyediaan dan pengendalian anggran investasi dan operasi, aliran kas pendapatan, aliran kas pembiayaan dan terselenggaranya laporan keuangan sesuai dengan kaidah perusahaan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum sehingga mampu mencapai efektifitas pengelolaan keuangan dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Adapun devisi bidang keuangan sebagai berikut:

- a. DM Anggaran
- b. DM Keuangan
- c. Supervisor Penegelolaan Pendapatan
- d. Supervisor Verifikasi
- e. Supervisor Pembayaran
- f. Supervisor Pajak dan Asuransi
- g. DM Akuntansi
- h. Supervisor Akuntansi AT dan PDP
- i. Supervisor Akuntansi Umum dan Biaya

Tugas dari bidang keuangan dan devisi-devisinya sebagai berikut :

1. Mengendalikan rencana jangka panjang dan rencana kerja dan anggaran bidang keuangan.
2. Menjamin terlaksananya penyediaan dan pengendalian anggran investasi dan operasi untuk pelaksanaan kegiatan perusahaan.
3. Menjamin terlaksananya pengendalian aliran kas pendapatan dank as pembiayaan untuk pengamanan pendapatan.
4. Menjamin terselenggaranya penyusunan laporan keuangan Unit induk, Unit pelaksana, dan sub unit pelaksana untuk laporan keuangan konsolidasi.

9. Manajer Bidang SDM dan Umum

Bertanggung jawab dalam membantu direktur keuangan dan umum dalam mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan kepegawaian, pengembangan SDM serta pengelolaan rumah tangga kantor, pemeliharaan/perbaikan peralatan sarana dan kebersihan dilingkungan kantor. Adapun devisi bidang SDM dan umum sebagai berikut:

- a. DM Pengembangan SDM
- b. SPV Pengelolaan Karir dan Diklat
- c. SPV Pengelolaan ORG dan Kinerja PEG
- d. DM Administrasi SDM
- e. Supervisor HI dan Pengawasan TK
- f. Supervisor Administrasi SDM
- g. SPV Kesejahteraan Pegawai
- h. DM Hukum dan Humas
- i. Supervisor Bantuan Hukum
- j. Supervisor Humas Kemitraan dan Bina Lingkungan
- k. DM ADM Umum dan Fasilitas

- I. Supervisor Sekretariat
- m. Supervisor Pengelolaan Fasilitas Kantor

Tugas dari manajer bidang SDM dan umum sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mengkoordinasikan tenaga kerja perusahaan yang hanya memperkerjakan karyawan yang berbakat
 2. Menjadi penghubung antara manajemen dengan karyawannya
 3. Melakukan pelayanan karyawan
 4. Memberikan masukan pada manajer mengenai kebijakan
 5. Mengawasi proses perekrutan, wawancara kerja, seleksi, dan penempatan karyawan baru.
 6. Menangani isu-isu ketenagakerjaan.
10. Unit pelaksana dan sub unit pelaksana

Bertanggung jawab memantau dan mengevaluasi ketentuan data dan melaksanakan tugas teknis operasi dan pemeliharaan transmisi data Garud Induk yang ada di sub unit pelaksana sesuai yang wilayah kerjanya. AP2B sistem sulsel didukung beberapa sub unit transmisi gardu induk yaitu :

- 1) Tragi Panakukang yang bertanggung jawab pada kegiatan pemeliharaan gardu induk Panakukang, Bantoala, Tallo lama, Barawaja, Borongloe, Sungguminasa, dan Tanjung Bunga.
- 2) Tragi Tello yang bertanggung jawab pada kegiatan operasi dan pemeliharaan gardu induk Tello (150 kv, 70kv, dan 30 kv), Maros, Daya, Pangkep, Bosowa, dan Tonasa III
- 3) Tragi Pare-Pare, yang bertanggung jawab pada kegiatan operasi dan peeliharaan gardu induk Pare-Pare, Barru, Bakaru, Pinrang, Polmas, dan Majene.
- 4) Tragi Sidrap, yang bertanggung jawab pada kegiatan operasi dan pemeliharaan gardu induk Sidrap, Sengkang, Soppeng, Makale, dan

Palopo.

- 5) Tragi Bulukumba, yang bertanggung jawab pada kegiatan operasi dan pemeliharaan gardu induk Bulukumba, Tallasa, Jeneponto, Sinjai dan bone.

4.1.4 Sumber dan Jenis Pendapatan

PT PLN (Persero) Wilayah Sulserabar memiliki sumber pendapatan utama yang berasal dari kegiatan operasional meskipun demikian tak jarang perusahaan memperoleh pendapatan dari kegiatan non operasional. Pendapatan yang didapat dari non operasional ini tidak memiliki nilai yang besar dari kegiatan operasional perusahaan. Keuangan perusahaan sangat tergantung pada pendapatan dari kegiatan operasional perusahaan.

1. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan. Pendapatan operasional PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar berasal dari kegiatan penjualan listrik baik pascabayar maupun prabayar.

2. Pendapatan Non operasional

Pendapatan non operasioanal adalah pendapatan yang diperoleh dari luar kegiatan pokok perusahaan yang sifatnya tidak tetap. Pendapatan non operasional PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar berasal dari pendapatan bunga dan pendapatan usaha lainnya.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Pengelolaan Penjualan Energi Listrik Pascabayar PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar

Pendapatan penjualan tenaga listrik adalah pendapatan yang diperoleh

PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar dari penyerahan tenaga listrik kepada pelanggan atas dasar pemakaian listrik. Prosedur sistem penjualan listrik pascabayar adalah sistem penjualan yang dilakukan oleh PT PLN Wilayah Sulselrabar yaitu dengan memberikan pelayanan jasa terlebih dahulu kemudian dilakukan penagihan sesuai dengan jasa yang diberikan. Pada listrik pascabayar pelanggan tidak akan mengalami mati lampu seketika, karena tidak perlu melakukan pengisian token. Namun pada listrik pascabayar terdapat biaya beban, sanksi pemutusan, dan terdapat petugas pencatat meter setiap bulannya. Listrik pascabayar PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar menyediakan golongan tarif mulai dari sosial, rumah tangga, bisnis, industri, dan publik. Pemisahan ini bertujuan untuk mengetahui golongan mana yang menghasilkan pendapatan tinggi.

4.2.2 Pengakuan Pendapatan Penjualan Pascabayar

Hasil wawancara dengan Ibu IIN selaku supervisor Bidang Akuntansi :

“PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar mengakui pendapatan pascabayar pada saat rekening tagihan terbit pada akhir bulan atas tenaga listrik yang telah digunakan oleh pelanggan. Pendapatan dari penjualan listrik pascabayar diakui sebagai piutang dari pelanggan. Listrik pascabayar diakui sebagai piutang karena pelanggan sudah terlebih dahulu menggunakan listrik dan pengukuran pendapatannya sesuai dengan besar tenaga listrik yang dipakai oleh pelanggan. Pemakaian listrik ditentukan dari hasil pembacaan meter listrik dan perhitungan dengan cara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendapatan penjualan listrik dihitung dari pemakaian listrik selama satu bulan dengan tarif yang berlaku.”

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan

jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Permasalahan utama dalam akuntansi untuk pendapatan adalah pada saat menentukan pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dan manfaat ini diukur secara andal. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar mengakui pendapatannya berdasarkan metode *accrual basis*, yang berarti pendapatan diakui pada saat terjadinya suatu transaksi meskipun belum ada klaim atas kas. Piutang akan timbul pada saat PLN melakukan penjualan listrik pascabayar dengan adanya bukti tagihan rekening listrik pelanggan. Adanya bukti tagihan rekening listrik tersebut akan menyebabkan timbulnya piutang bagi PLN. Sistem pencatatan piutang tagihan listrik terhadap jasa yang telah diberikan tersebut menggunakan *accrual basis* dimana proses pengakuan piutang terjadi dan terhitung sejak awal pemakaian listrik (pencatatan meter listrik) tetapi penagihannya tidak langsung ditagih kepada pelanggan dan dikumpulkan terlebih dahulu selama satu bulan. Berikut ini adalah jurnal pengakuan pendapatan atas penjualan listrik pascabayar :

- a. Saat rekening listrik diterbitkan pada akhir bulan

Piutang	xxx
Pendapatan	xxx

- b. Saat rekening diserahkan kepada pelanggan dan telah dibayar

Kas	xxx
Piutang	xxx

4.2.3 Pengukuran Pendapatan Penjualan Pascabayar

Hasil wawancara dengan Ibu IIN sebagai supervisor Bidang akuntansi :

“Jumlah pendapatan yang berasal dari penjualan listrik pascabayar oleh PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar dinilai sebesar pemakaian listrik selama satu bulan berdasarkan kwh yang dijual dan jumlah piutang yang akan diterima diakhir bulan dari pelanggan. Untuk pengukuran pendapatan penjualan listrik

pascabayar dengan mengalihkan jumlah pemakaian listrik dalam satuan kwh dengan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dikenakan kepada pelanggan tersebut.”

Pengukuran adalah menetapkan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam laporan laba rugi. Pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar, pengukuran pendapatan terjadi pada saat penjualan/penyerahan jasa. Pendapatan diakui pada saat ada kejadian transaksi dan diukur berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dari penjualan/ penyerahan jasa tersebut. Pengukuran pendapatan penjualan listrik pascabayar adalah sejumlah nilai rupiah yang harus dilunasi oleh pelanggan pada rekening yang tercetak sesuai dengan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berlaku. Pengukuran untuk pengakuan masing-masing pendapatan usaha PT PLN (Persero) adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan penjualan listrik yaitu jumlah rupiah yang harus dilunasi oleh pelanggan untuk biaya beban dan pemakaian tenaga listrik berdasarkan tarif yang berlaku.
2. Pendapatan subsidi pemerintah yaitu dihitung berdasarkan besarnya subsidi listrik dalam 1 (satu) tahun anggaran secara final.
3. Pendapatan penyambungan pelanggan yaitu, jumlah rupiah amortisasi pendapatan yang ditanggihkan dari biaya penyambungan yang diperhitungkan sebagai pendapatan periode yang bersangkutan.
4. Pendapatan usaha lainnya yaitu, jumlah rupiah yang diterima dari biaya administrasi tagihan biaya keterlambatan, hasil penyewa trafo, genset, dan sebagainya.

4.2.4 Pelaporan dan Penyajian Pendapatan Penjualan Pascabayar

Hasil dari wawancara dengan Ibu IIN selaku supervisor Bidang akuntansi :

“PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar melaporkan pendapatan pascabayar dalam laporan laba/rugi pendapatan yang telah diakui dan diukur akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan yaitu laporan laba rugi.”

Pada dasar akrual, pendapatan akan di laporkan dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Pendapatan maupun beban yang saling terkait akan diakui dan akan dilaporkan pada periode yang sama. Berikut adalah laporan keuangan laba rugi :

Tabel 4.1
Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Unsur (Sifat)
Periode Dua Belas Bulan Yang Berakhir
30 April 2018 dan 2017

KETERANGAN	UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 APRIL 2018	UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 APRIL 2017
PENDAPATAN USAHA		
Penjualan tenaga listrik		
Subsidi listrik pemerintah		
Penyambungan pelanggan		
Lain-lain		
BEBAN USAHA		
Pembelian tenaga Listrik		
sewa diesel/Genset		
Pemeliharaan		
Laba (Rugi) Usaha		
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN- LAIN		
Pendapatan bunga		
Pendapatan Lain-lain		
LABA (RUGI) SEBELUM PPh BADAN		
Beban pajak		
LABA (RUGI) DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN		
LABA (RUGI) DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN		
LABA (RUGI) BERSIH		

Sumber: Data diolah

4.2.5 Pengungkapan Pendapatan Penjualan Pascabayar

Hasil dari wawancara dengan Ibu IIN selaku supervisor Bidang akuntansi :

“PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar mengungkapkan pendapatan ke dalam laporan laba rugi. Pada laporan perusahaan yang terdapat kategori untuk pengungkapan pendapatan yaitu pendapatan usaha, pendapatan lain-lain dan biaya lain-lain yang didalamnya telah mencakup setiap pos-pos yang telah disebutkan sebelumnya.”

Pengungkapan pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar telah menyertakan kebijakan–kebijakan akuntansi dalam pengakuan pendapatan yaitu *Accrual basis*, dan pada setiap pos-pos pendapatan telah diungkapkan menurut pos–posnya masing-masing dalam laporan laba rugi perusahaan. Pendapatan penjualan listrik diakui berdasarkan pemakaian energi listrik (kwh), sedangkan beban diakui pada saat terjadinya. Pendapatan merupakan pos yang terpenting dalam laporan laba rugi, sehingga membutuhkan kebijakan yang tepat dalam menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pendapatan usaha didalam penyusunan laporan keuangan. Pendapatan penjualan listrik didasarkan pada tarif dasar listrik yang telah ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia. Kebijakan akuntansi yang signifikan digunakan dalam menyusun laporan keuangan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. PT PLN (Persero) mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), kebijakan atas Standar akuntansi yang diterapkan PT PLN seperti PSAK 23 tentang “Pendapatan” dan PSAK 1 tentang “Penyajian Laporan Keuangan”. Kebijakan yang tepat dalam mengakui pendapatan akan memberikan informasi yang relevan mengenai jumlah nominal pendapatan dalam laporan laba rugi, sehingga laporan laba rugi dapat diandalkan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan

Perlakuan akuntansi terhadap pendapatan diawali dengan pengakuan pendapatan, pengukuran pendapatan, pelaporan pendapatan dan pengungkapan pendapatan. Perlakuan akuntansi terhadap pendapatan atas penjualan listrik pascabayar pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar akan dibandingkan antara PSAK No. 23 dengan perlakuan akuntansi yang diterapkan PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar.

4.3.2 Pengakuan Pendapatan

Menurut PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar; PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar memberikan jasa tenaga listrik kepada pelanggannya atas dasar pemakaian listrik setiap bulan. Pendapatan listrik pascabayar pada awal diakui sebagai piutang yang akan diterima dari pelanggan. Pencatatan pengakuan pendapatan PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar menggunakan metode *Accrual basis*, yang berarti pendapatan diakui pada saat transaksi terjadi tanpa memperhatikan penerimaan atau klaim atas kas. Pengakuan pendapatan pascabayar diakui setelah jasa dipenuhi kemudian baru diterbitkannya rekening maka timbulah penerimaan atas kas atau klaim atas kas.

Menurut PSAK No. 23; pendapatan diakui jika kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas dan niali manfaat tersebut dapat diukur dengan andal. Akan tetapi, jika ketidakpastian timbul atas kolektibilitas jumlah yang telah termasuk dalam pendapatan, maka jumlah yang tidak tertagih atau jumlah pemulihan yang kemungkinannya tidak lagi besar diakui sebagai beban, bukan sebagai penyesuaian terhadap jumlah pendapatan yang diakui semula.

4.3.3 Pengukuran Pendapatan

Menurut PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar; Pendapatan pascabayar pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar diukur berdasarkan jumlah piutang yang akan diterima pada akhir bulan dari pelanggan, pendapatan diukur berdasarkan kwh yang dijual. Pengukuran pendapatan sangat penting untuk setiap transaksi yang menimbulkan pendapatan agar dapat menghasilkan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan. PT PLN (Persero) menyatakan bahwa nilai tukar dari pemberian jasa adalah ukuran yang akan diterima pada saat kas diterima. Pendapatan dari hasil penjualan jasa tersebut dinilai wajar. Artinya pengukuran pendapatan atas pemberian jasa. Pendapatan PT PLN (Persero) diukur dengan nilai wajar imbalan, nilai wajar imbalan adalah pendapatan yang akan diterima atau dapat diterima perusahaan dari suatu transaksi.

Menurut PSAK No.23; pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima, dan jumlah yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara entitas dengan pembeli atau pengguna aset tersebut. Jumlah tersebut diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dikurangi jumlah diskon usaha dan rabat volume yang diperbolehkan oleh entitas.

4.3.4 Pelaporan dan Penyajian Pendapatan

Menurut PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar;

PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar melaporkan pendapatan dalam laporan laba/rugi yang di dalamnya terdapat pendapatan usaha, pendapatan penjualan tenaga listrik, pendapatan penyambungan listrik, pendapatan subsidi listrik pemerintah, pendapatan penyambungan pelanggan dan pendapatan lainnya.

Menurut PSAK No.23; pelaporan pendapatan dalam akuntansi akan dilaporkan dalam laporan laba/rugi pada periode saat pendapatan dihasilkan.

4.3.5 Pengungkapan Pendapatan

Menurut PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar; dalam pengungkapan pendapatan, PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar mengungkapkan pendapatan pada laporan laba rugi dan disajikan menurut pos masing-masing. Laporan keuangan disajikan dalam metode *accrual basis*. Dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan, masing-masing pos pendapatan dilengkapi dengan pengungkapan sebagai berikut :

- 1). Pendapatan listrik, diungkapkan menurut golongan pelanggan yaitu sosial, rumah tangga, bisnis, industri, dan publik. Pada semua golongan pelanggan tersebut diungkapkan berdasarkan informasi jumlah pendapatan penjualan listrik selama satu periode berjalan.
- 2). Subsidi listrik pemerintah, diungkapkan besaran jumlah pendapatan yang berasal dari subsidi.
- 3). Pendapatan penyambungan pelanggan, diungkapkan dari jumlah pendapatan penyambungan pelanggan sebelumnya dan periode yang sedang berjalan.
- 4). Pendapatan usaha lainnya, diungkapkan dari jumlah pendapatan usaha lainnya selama satu periode berjalan dan periode sebelumnya. Kemudian akan dijelaskan transaksi atau peristiwa yang menimbulkan pendapatan usaha lainnya.

Menurut PSAK No. 23; entitas mengungkapkan hal berikut ini di catatan atas laporan keuangan :

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa,

2. Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut, termasuk pendapatan yang berasal dari :
 - a. Penjualan barang,
 - b. Penjualan jasa,
 - c. Bunga,
 - d. Royalti
 - e. Dividen, dan
3. Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan.

Tabel 4.2

Perbandingan Perlakuan Akuntansi Pendapatan menurut PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar dan PSAK No. 23

PSAK No. 23	PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar	Keterangan
Pendapatan diakui jika : Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas.	PT PLN mengakui pendapatan penjualan tenaga listrik pascabayar sebagai piutang yang akan diterima dari pelanggan pada akhir bulan.	Sesuai
Pengukuran pendapatan : jumlah pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima.	PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar mempraktekkan bahwa nilai tukar dari pemberian jasa adalah ukuran yang akan diterima pada saat kas diterima. PT PLN mengukur pendapatan berdasarkan satuan rupiah.	Sesuai

Pelaporan pendapatan dilakukan berdasarkan pos masing-masing pendapatan sesuai dengan klasifikasinya dalam laporan laba rugi.	PT PLN (Persero) melaporkan pendapatan dalam laporan laba rugi berdasarkan pos masing-masing seperti pendapatan usaha, beban usaha, dan pendapatan lain-lain.	Sesuai
Entitas mengungkapkan : a. Pengakuan pendapatan, termasuk metode untuk menentukan penyelesaian transaksi penjualan jasa. b. Pendapatan yang diakui termasuk penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royalti dan dividen. c. Pertukaran barang atau jasa tercakup dalam setiap kategori yang signifikan dari pendapatan.	untuk pengungkapan pendapatan PT PLN (Persero) mengungkapkan seluruh pendapatan baik dari pendapatan operasional seperti penjualan tenaga listrik, maupun non operasional seperti pendapatan bunga dan pendapatan lain-lain.	Sesuai

Sumber: Data diolah

4.4 Hasil Analisis

Berdasarkan tabel perbandingan antara PT PLN dengan PSAK No. 23 dapat dilihat bahwa PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar telah menerapkan perlakuan akuntansi sesuai dengan prinsip Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 tentang pendapatan mulai dari pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan. Dalam pengakuan pendapatan jasa, titik paling kritikal berada pada pemberian jasa yang diberikan. Pendapatan diakui dalam periode akuntansi pada saat jasa diberikan. PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar menghasilkan pendapatan dari penjualan jasa yaitu dari pembayaran listrik menggunakan sistem pascabayar dan Prabayar.

Dalam PSAK No. 23 tentang peristiwa ekonomi sebagai sumber utama dalam pendapatan bagi perusahaan. Analisa tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan akan membantu dalam kelangsungan perusahaan di masa yang akan datang. Jika perusahaan keliru dalam menentukan pendapatan maka akan berdampak pada pengambilan keputusan yang tidak tepat dari pembaca laporan keuangan perusahaan tersebut. Dengan diterapkannya PSAK No.23 maka laporan keuangan laba rugi pada perusahaan dapat dipercaya kebenarannya.

Dalam pelaporan dan penyajian, PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar melaporkan seluruh pendapatan yang didapat dari penjualan listrik, pendapatan yang diterima dari pelanggan akan diakumulasikan dan dicatat dalam laporan laba rugi. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 23. Dampak dari penerapan PSAK No.23 yaitu untuk menghasilkan informasi laporan keuangan yang relevan dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya selama periode tersebut.

Pada pengungkapan PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar telah sesuai dengan PSAK No. 23 dimana telah mengungkapkan pendapatan dari penjualan listrik menurut pos pendapatan masing-masing. Dampak dari penerapan PSAK No.23 dimana pemakai laporan keuangan mendapatkan informasi untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengakuan pendapatan penjualan listrik pascabayar pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar menggunakan metode *accrual basis* yang berarti pendapatan diakui pada saat transaksi tanpa memperhatikan penerimaan kas. Pengakuan pendapatan atas penjualan listrik pascabayar telah sesuai dengan PSAK No.23.
2. Pengukuran pendapatan pada PT PLN (Persero) telah sesuai dengan PSAK No.23. Pendapatan pascabayar diukur berdasarkan jumlah piutang yang akan diterima di akhir bulan dari pelanggan sesuai dengan kwh yang dijual. Pengukuran pendapatan berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima.
3. Pendapatan pascabayar pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar dilaporkan dalam laporan laba rugi berdasarkan pos masing-masing pendapatan sesuai dengan klasifikasinya, dan telah sesuai dengan PSAK No.23.
4. Pada pengungkapan pendapatan listrik pascabayar PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar telah sesuai dengan PSAK No. 23 dimana telah mengungkapkan pendapatan menurut pos pendapatan masing-masing.

5.2 **Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian ini yaitu, Dalam pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan pendapatan dalam PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar telah menggunakan metode-metode yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, hendaknya dipertahankan dalam menjalankan hal tersebut dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [Bahri, Syaiful. 2016. *Pengantar Akuntansi Edisi 1*. Yogyakarta: Penerbit Andi](#)
- [Chandani, Narida Prameita. 2015. *Analisis Pengakuan Pendapatan Pada PT PLN \(Persero\) Area Surabaya Utara*. Diterbitkan.Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.](#)
- [Hery. 2013. *Teori Akuntansi*. Penerbit Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.](#)
- [Ikatan Akuntan Indonesia, 2015. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.](#)
- Kantrimaharani, 12 April 2016. *Perbedaan Pascabayar dan Listrik Prabayar*.(online), <https://www.liputan6.com/properti/read/2480390/perbedaan-pascabayar-dan-listrik-prabayar>
- [Marcella, Synthia. 2013. *Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan berdasarkan PSAK No.23 Pada PT Pandu Siwi Sentosa Palembang*. Palembang: STIE MDP.](#)
- [Martini,Dwi dan Dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Menengah. Buku 2*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.](#)
- Octaviani, Vivi. 2014. *Analisis Pengelolaan Penjualan Energi Listrik Pascabayar dan Prabayar Pada B'right PLN Batam*:Politeknik Negeri Batam.
- Samryn, 2014. *Pengantar Akuntansi.Edisi IFRS*. Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Sedarmayanti, dan Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Soemarso, 2002. *Akuntansi Suatu Pengantar Edisi 5*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sujarweni,V. Wiratna. 2016. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit pustaka baru press.
- Sugiyono, 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Susanto, Azhar. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi I : Pendekatan Manual Pratika Penyusunan Metode dan Prosedur Edisi Kedelapan* : Bandung.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Akun pendapatan

LABARUGI		LABA RUGI
51		Pendapatan Usaha
510		Penjualan tenaga listrik
PENJ TL		Penjualan Tenaga Listrik (bruto)
PENJ TL	5101000000	5101000000 Pendapatan penjualan tenaga listrik
PENJ TL	5101000001	5101000001 Pendapatan penjualan tenaga listrik pra bayar
PENJ TL		Total Penjualan Tenaga Listrik (bruto)
DISKON		Discount
DISKON	5105000000	5105000000 Potongan penjualan pelanggan
DISKON		Total Discount
510		Total Penjualan tenaga listrik
5104		Subsidi listrik pemerintah
5104	5104000000	5104000000 Pendapatan subsidi pemerintah
5104		Total Subsidi listrik pemerintah
5103		Penyambungan pelanggan
5103	5103000000	5103000000 Pendapatan penyambungan Listrik
5103		Total Penyambungan pelanggan
5105		Lain-lain
5105	5105000301	5105000301 Pendapatan Pemakaian Trafo
5105	5105000400	5105000400 Pendapatan Biaya Administrasi
5105	5105000700	5105000700 Pendapatan penggantian peralatan
5105		Total Lain-lain
51		Total Pendapatan Usaha
61		Beban Usaha
61011-2		Pembelian tenaga listrik
61011-2	6101100000	6101100000 Pembelian tenaga listrik - Holding
61011-2	6101300000	6101300000 Pembelian tenaga listrik - IPP
61011-2		Total Pembelian tenaga listrik
61013		Sewa genset
61013	6101310000	6101310000 Sewa mesin pembangkit
61013		Total Sewa genset
6103		Bahan Bakar dan minyak pelumas
6103000300	6103000300	6103000300 Beban minyak bakar HSD
6103000300		
6103000500	6103000500	6103000500 Beban minyak bakar residu
6103000500		
6103000200	6103000200	6103000200 Beban batu bara
6103000200		
6103000100	6103000100	6103000100 Beban bahan bakar tenaga air
6103000100		
6103000800	6103000800	6103000800 Beban pelumas
6103000800		
6103000900	6103000900	6103000900 Campuran Minyak Bakar, Bahan Kimia, Dll
6103000900		
6103		Total Bahan Bakar dan minyak pelumas
6106		Pemeliharaan
61061		Pemakaian material
61061	6106100100	6106100100 Beban pemakaian mate. - transformator
61061	6106100200	6106100200 Beban pemakaian mate. - Switchgear dan Jaringan
61061	6106100300	6106100300 Beban pemakaian mate. - Kabel
61061	6106100400	6106100400 Beban pemakaian mate. - Alat Ukur
61061	6106100500	6106100500 Beban pemakaian mate. - Menara dan Tiang

61061	6106100600	6106100600 Beban pemakaian mate. - Sistem Teleinformasi Data
61061	6106100700	6106100700 Beban pemakaian mate. - Persediaan Umum
61061	6106100800	6106100800 Beban pemakaian mate. - Minyak dan pelumas
61061	6106101100	6106101100 Beban pemakaian mate - instalasi & mesin
61061		Total Pemakaian material
61062		Jasa borong
61062	6106200100	6106200100 Beban jasa borong Tanah & Hak atas Tanah
61062	6106200200	6106200200 Beban jasa borong Bangunan dan Kelengkapan Halaman
61062	6106200300	6106200300 Beban jasa borong Bangunan Saluran Air & Perlengk.
61062	6106200400	6106200400 Beban jasa borong Jalan dan Sepur Samping
61062	6106200500	6106200500 Beban jasa borong Instalasi dan Mesin
61062	6106200600	6106200600 Beban jasa borong Perlengk. Penyaluran Tng Listrik
61062	6106200700	6106200700 Beban jasa borong Gardu Induk
61062	6106200800	6106200800 Beban jasa borong Saluran Udara Tegangan Tinggi
61062	6106200900	6106200900 Beban jasa borong Kabel di bawah tanah
61062	6106201000	6106201000 Beban jasa borong Jaringan Distribusi
61062	6106201100	6106201100 Beban jasa borong Gardu Distribusi
61062	6106201200	6106201200 Beban jasa borong perlengk. Lain-lain Distribusi
61062	6106201300	6106201300 Beban jasa borong perlengk. Pengolahan Data
61062	6106201400	6106201400 Beban jasa borong perlengk. Transmisi Data
61062	6106201500	6106201500 Beban jasa borong perlengk. Khusus
61062	6106201600	6106201600 Beban jasa borong perlengk. Telekomunikasi
61062	6106201700	6106201700 Beban jasa borong perlengk. Umum
61062	6106201800	6106201800 Beban jasa borong Kend. Bermotor dan Alat Yg Mobil
61062		Total Jasa borong
6106		Total Pemeliharaan
6105		Kepegawaian
GAJI		Beban Kepegawaian dalam Bentuk Kompensasi
GAJI	6105100110	6105100110 Pay For Person (P1)
GAJI	6105100700	6105100700 Pay For Position (P2)
GAJI	6105100800	6105100800 Pay For Performance (P3)
GAJI	6105100900	6105100900 Bonus / Insentif
GAJI		Total Beban Kepegawaian dlm Bentuk Kompensasi
CUTI&LAIN		Beban Kepegawaian dlm Bentuk Manfaat Pegawai
CUTI&LAIN	6105200100	6105200100 Beban Tunjangan Cuti tahunan
CUTI&LAIN	6105200200	6105200200 Beban Tunjangan Cuti Besar
CUTI&LAIN	6105200400	6105200400 Beban Penghargaan Kesetiaan kerja (Winduan)
CUTI&LAIN	6105200500	6105200500 Beban Pesangon Normal
CUTI&LAIN	6105200800	6105200800 Beban Tunjangan Hari Raya
CUTI&LAIN	6105200900	6105200900 Beban luran Pemberi Kerja
CUTI&LAIN	6105200901	6105200901 Beban luran Pemberi Kerja BPJS JHT
CUTI&LAIN	6105200902	6105200902 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan
CUTI&LAIN	6105200903	6105200903 Beban IPK BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja
CUTI&LAIN	6105200904	6105200904 Beban IPK BPJS Jaminan Kematian
CUTI&LAIN	6105200905	6105200905 Beban luran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Pensiun

CUTI&LAIN	6105201100	6105201100 Beban PPh 21 yang ditanggung perusahaan
CUTI&LAIN	6105201500	6105201500 Beban Pensiun Dini
CUTI&LAIN	6105201700	6105201700 Beban Pemeliharaan Kesehatan
CUTI&LAIN	6105201800	6105201800 Beban Pakaian Dinas
CUTI&LAIN	6105201900	6105201900 Bantuan Pengganti Fasilitas Perumahan (BPPF)
CUTI&LAIN	6105202000	6105202000 Perjalanan Dinas Mutasi jabatan
CUTI&LAIN	6105202100	6105202100 Bantuan kematian/pemakaman
CUTI&LAIN	6105202300	6105202300 Beban Fasilitas Kendaraan
CUTI&LAIN		Total Bebn Kpegwaian dlm Bntuk Mnfaat Pegawai
DIKLATLAIN	6105300100	6105300100 Beban Peserta Latihan (Inhouse Training)
DIKLATLAIN	6105301110	6105301110 Pembinaan spiritual, budaya, OR (SBO)
DIKLATLAIN		
6105		Total Kepegawaian
6104A		Penyusutan aktiva tetap
6104A	6104000200	6104000200 Beban depresiasi Bangunan dan Kelengkapan Halaman
6104A	6104000300	6104000300 Beban depresiasi Bang. Saluran Air dan Perlengk
6104A	6104000400	6104000400 Beban depresiasi Jalan dan Sepur Samping
6104A	6104000500	6104000500 Beban depresiasi Instalasi dan Mesin
6104A	6104000600	6104000600 Beban depresiasi Perlengk. Penyaluran Tng Listrik
6104A	6104000700	6104000700 Beban depresiasi Gardu Induk
6104A	6104000800	6104000800 Beban depresiasi Saluran Udara Tegangan Tinggi
6104A	6104000900	6104000900 Beban depresiasi Kabel di bawah tanah
6104A	6104001000	6104001000 Beban depresiasi Jaringan Distribusi
6104A	6104001100	6104001100 Beban depresiasi Gardu Distribusi
6104A	6104001200	6104001200 Beban depresiasi Perlengkapan Lain-lain Distribusi
6104A	6104001300	6104001300 Beban depresiasi Perlengkapan Pengolahan Data
6104A	6104001500	6104001500 Beban depresiasi Perlengkapan Transmisi Data
6104A	6104001600	6104001600 Beban depresiasi Perlengkapan Telekomunikasi
6104A	6104001700	6104001700 Beban depresiasi Perlengkapan Umum
6104A	6104001800	6104001800 Beban depresiasi Kend. Bermotor dan Alat Yg Mobil
6104A	6104001900	6104001900 Beban depresiasi Material Cadang
6104A		Total Penyusutan aktiva tetap
6107		Lain-lain
61071		Biaya Administrasi Niaga
61071	6107100100	6107100100 Pengelolaan Pelanggan
61071	6107100200	6107100200 Baca Meter
61071	6107100500	6107100500 Beban Penagihan (Collection Fee)
61071	6107100600	6107100600 Beban Pemutusan dan Penyambungan Kembali
61071	6107100700	6107100700 Beban P2TL
61071	6107100800	6107100800 Beban Penyisihan Piutang
61071	6107100900	6107100900 Beban Pemasaran
61071	6107101000	6107101000 Teknologi Informasi Niaga
61071		Total Biaya Administrasi Niaga
61072		Biaya Administrasi dan Umum
61072	6107200100	6107200100 Honorarium

61072	6107200200	6107200200 Pemakaian Perkakas & Peralatan
61072	6107200300	6107200300 Asuransi
61072	6107200400	6107200400 Perjalanan Dinas Non Diklat
61072	6107200700	6107200700 Teknologi Informasi
61072	6107200800	6107200800 Listrik, Gas dan Air
61072	6107200900	6107200900 Pos & Telekomunikasi
61072	6107201000	6107201000 Beban Bank
61072	6107201100	6107201100 Bahan Makanan & Konsumsi
61072	6107201200	6107201200 Sewa gedung / tanah
61072	6107201300	6107201300 Sewa Foto Copy dan Kelengkapannya
61072	6107201400	6107201400 Alat dan Keperluan Kantor
61072	6107201500	6107201500 Barang Cetak dan Penerbitan
61072	6107201600	6107201600 Pajak dan Retribusi
61072	6107201700	6107201700 Iuran, Abodemen & Iklan
61072	6107201900	6107201900 Beban Keamanan
61072	6107202100	6107202100 Beban Penyisihan Material
61072		Total Biaya Administrasi dan Umum
6107		Total Lain-lain
61		Total Beban Usaha
52/62		Pendapatan (beban) lain-lain
52B	5201100000	5201100000 Pendapatan dari penjualan aktiva tetap
52B	5203110000	5203110000 Pendapatan Sewa Tiang Jaringan
52B	5203120000	5203120000 Pendapatan Sewa Wisma/Rumah Dinas/Ruangan
52B	5203200000	5203200000 Pendapatan Penjualan Dok.Tender/lelang/RKS
52B	5203300000	5203300000 Pendapatan Bank Garansi
52B	5203800000	5203800000 Pend. Penerimaan Kembali Piutang yg tih Dihapus
52B	5204000000	5204000000 Pendapatan Biaya Keterlambatan Reklis
52B	5204100000	5204100000 Pendapatan Denda Non Reklis
52B	5205100000	5205100000 Pendapatan Jasa Giro
52B	5206000000	5206000000 Pendapatan Pekerjaan Pihak Ketiga
52B	5208000000	5208000000 Pendapatan lain-lain
52B	5208100000	5208100000 Keuntungan (Kerugian) - Properti Investasi
BEBAN PINJ		Beban pinjaman ()
BEBAN PINJ	6201100000	6201100000 Beban komitmen
BEBAN PINJ	6201300000	6201300000 Beban bunga pinjaman
BEBAN PINJ	6202100000	6202100000 Beban bunga obligasi
BEBAN PINJ	6202200000	6202200000 Beban emisi obligasi
BEBAN PINJ		Total Beban pinjaman ()
BEBAN PENS		Beban pensiun ()
BEBAN PENS	6205000000	6205000000 Beban Pensiun - Perawatan Kesehatan
BEBAN PENS	6205000001	6205000001 Beban Pensiun - Bingkisan Hari Raya Keagamaan
BEBAN PENS		Total Beban pensiun ()
BEBAN LAIN		Beban lain-lain ()
BEBAN LAIN	6204300000	6204300000 Beban Selisih Penerimaan BBM
BEBAN LAIN	6208000200	6208000200 CSR - Bantuan Sosial & Pengentasan Kemiskinan
BEBAN LAIN	6210100000	6210100000 Rugi Akibat Percepatan Penyusutan AT Akan dihapus
BEBAN LAIN	6210102000	6210102000 Beban Penyusutan ATTB Yang Akan

		Direlokasi
BEBAN LAIN	6210103000	6210103000 Beban Penyusutan ATTB Yang Akan Diperbaiki
BEBAN LAIN	6210200000	6210200000 Rugi Akibat Percepatan Material AT Akan dihapus
BEBAN LAIN	6210300000	6210300000 Beban Penyesuaian Tahun Lalu
BEBAN LAIN	6210400000	6210400000 Laba (rugi) dari selisih pembulatan
BEBAN LAIN	6210600000	6210600000 Beban denda
BEBAN LAIN	6210800000	6210800000 Beban lain-lain - lainnya
BEBAN LAIN		Total Beban lain-lain ()
BEBANKURS		Beban selisih kurs ()
BEBANKURS	6211100000	6211100000 Rugi (laba) valuta asing - belum terealisasi
BEBANKURS	6211200000	6211200000 Rugi (laba) valuta asing - telah terealisasi
BEBANKURS		Total Beban selisih kurs ()
52/62		Total Pendapatan (beban) lain-lain
PL RESULT		
LABARUGI		TOTAL LABA RUGI

Lampiran 2: Laporan laba/rugi dan penghasilan komprehensif lain per unsur (sifat)

KETERANGAN	UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 APRIL 2018	UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 APRIL 2017
PENDAPATAN USAHA		
- Penjualan Tenaga listrik		
- Penjualan Tenaga listrik (Bruto)		
- Discount		
- Subsidi Listrik Pemerintah		
- Penyambungan Pelanggan		
- Lain - lain		
BEBAN USAHA		
- Pembelian Tenaga Listrik		
- Sewa Diesel/Genset		
- Beban Penggunaan Transmisi		
- Bahan Bakar dan Minyak Pelumas		
- H S D		
- M F O / Residu		
- I D O		
- Batu bara		
- Gas alam		
- Panas Bumi		
- A i r		
- Campuran Bahan Bakar dll.		
- Minyak Pelumas		
- Pemeliharaan		
- Pemakaian Material		
- Jasa Borongan		
- Kepegawaian		
- Penyusutan Aset Tetap		

- Administrasi		
LABA (RUGI) USAHA		
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
- Pendapatan Bunga		
- Pendapatan Lain-lain		
- Beban Pinjaman ()		
- Beban Pensiun ()		
- Beban Lain-Lain ()		
- Beban Selisih Kurs ()		
LABA (RUGI) SEBELUM PPh BADAN		
BEBAN PAJAK		
Beban Pajak Kini		
Beban Pajak Tangguhan		
LABA (RUGI) DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN		
LABA (RUGI) DARI OPERASI YG DIHENTIKAN		
LABA (RUGI) BERSIH		

Lampiran 3: Laporan laba/rugi dan penghasilan komprehensif lain

KETERANGAN	UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 APRIL 2018	UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 APRIL 2017
LABA (RUGI) BERSIH		
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak		
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi		
Keuntungan revaluasi aset tetap		
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		
Bagian keuntungan/kerugian revaluasi aset tetap entitas asosiasi		
Pos-pos yang Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		
Aset keuangan tersedia untuk dijual		
Lindung nilai arus kas		
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK		
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF		
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk		
Kepentingan Non-Pengendali		

Lampiran 4: Laporan laba/rugi dan penghasilan komprehensif fungsi

K E T E R A N G A N	UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 APRIL 2018	UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 APRIL 2017
A. PENDAPATAN USAHA		
B. BEBAN USAHA		
- Pembelian Tenaga Listrik		
- Sewa Diesel/Genset		
- Beban Penggunaan Transmisi		
Fungsi Pembangkitan :		
- Pembangkitan PLTA		
- Pembangkitan PLTU		
- Pembangkitan PLTD		
- Pembangkitan PLTG		
- Pembangkitan PLTP		
- Pembangkitan PLTGU		
- Pembangkitan PLTS		
Sub Jumlah		
Fungsi Transmisi :		
- Sistik Transmisi		
- Sistik Tele Informasi Data		
Sub Jumlah		
Fungsi Distribusi :		
- Sistik Distribusi		
- Unit Pengatur Distribusi		
Sub Jumlah		
Fungsi Tata Usaha Langganan		
Fungsi Pendukung :		
- Tata Usaha		
- Gudang dan Persediaan Bahan		
- B e n g k e l		
- Laboratorium		
- Jasa-Jasa Teknik		
- Wisma dan Rumah Dinas		
- Sistik Telekomunikasi		
- Rupa-Rupa Jasa Umum		
- Pendidikan dan Latihan		
Sub Jumlah		
C. LABA USAHA		
D. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
E. LABA (RUGI) SEBELUM PPh BADAN		
BEBAN PAJAK		
Beban Pajak Kini		
Beban Pajak Tangguhan		
LABA (RUGI) DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN		
LABA (RUGI) DARI OPERASI YG DIHENTIKAN		
LABA (R U G I) B E R S I H		
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK		
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF		

Lampiran 5: Foto wawancara



Lampiran 6: Gedung PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar

